



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019**

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagai instrument dalam pengelolaan arsip dinamis untuk memfasilitasi penciptaan, akses dan penggunaan, serta penyusutan arsip;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, perlu disusun klasifikasi arsip Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

STAMPED AREA

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1953);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Balangan Nomor 24 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2018 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
7. Klasifikasi adalah penggolongan naskah atau arsip berdasarkan masalah yang termuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan penataan dan penemuan kembali arsip.
8. Klasifikasi masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip.
9. Kode Klasifikasi arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.
10. Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang mengolah atau menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor urut.
11. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis ditambahkan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.
12. Indek adalah petunjuk atau tanda pengenal, sebagai alat untuk menunjukkan isi masalah (topik) perihal suatu dokumen atau sekelompok dokumen/berkas.
13. Kartu Tunjuk Silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberi petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan dengan file yang lainnya



BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Pedoman Klasifikasi Arsip adalah sebagai pedoman pengelompokan arsip secara logis dan sistematis yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi Klasifikasi Arsip dengan kode klasifikasi arsip sebagai berikut:

- a. 000 Umum
- b. 100 Pemerintahan;
- c. 200 Politik;
- d. 300 Keamanan/Ketertiban;
- e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
- f. 500 Perekonomian;
- g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
- h. 700 Pengawasan;
- i. 800 Kepegawaian; dan
- j. 900 Keuangan.

BAB IV KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip meliputi perincian kesatu, perincian kedua dan perincian ketiga.
- (2) Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan melaksanakan tugas di lingkungan pemerintahan daerah.
- (3) Klasifikasi arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

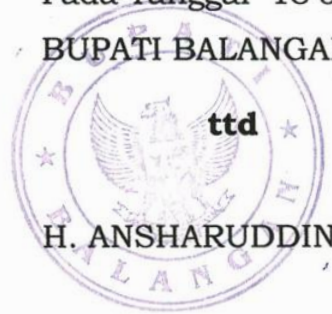


BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada Tanggal 18 Juli 2019
BUPATI BALANGAN,



Diundangkan di Paringin,
pada tanggal 18 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. RUSKARIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN



H. M. IWAN SETIADY, SH
NIP. 19780929 200501 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP

A. BENTUK DAN SUSUNAN POLA KLASIFIKASI

1. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 (tiga) perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi;
2. Kode adalah tanda pengenal masalah seperti yang tercantum dalam pola klasifikasi;
3. Kode Klasifikasi adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas ditempat penyimpanannya;
4. Kode komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang mengolah/menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor urut;
5. Kegiatan fasilitatif adalah kegiatan penunjang untuk membantu memperlancar tugas pokok dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan suatu instansi;
6. Kegiatan Substantif adalah kegiatan yang menyangkut fungsi dan tugas pokok organisasi yang bersangkutan dan bersifat operasional, kegiatan substantif ini membedakan antara organisasi satu dengan yang lainnya;
7. Angka 100 sampai dengan 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif di luar pengawasan, kepegawaian dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, seperti protocol urusan dalam dan masalah yang tidak dapat dimasukan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambing Negara atau Daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
8. Sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten termasuk instansi - instansi dalam lingkungannya.
Sepuluh pokok masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:
 - a. 000 Umum;
 - b. 100 Pemerintahan;
 - c. 200 Politik;
 - d. 300 Keamanan dan Ketertiban;
 - e. 400 Kesejahteraan;



- f. 500 Perekonomian;
 - g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
 - h. 700 Pengawasan;
 - i. 800 Kepegawaian;
 - j. 900 Keuangan.
9. Kode pembantu merupakan penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan di belakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:
- a. 01 Perencanaan;
 - b. 02 Penelitian;
 - c. 03 Pendidikan;
 - d. 04 Laporan;
 - e. 05 Panitia;
 - f. 06 Seminar, Lokakarya, Workshop;
 - g. 07 Statistik;
 - h. 08 Peraturan perundang-undangan;
 - i. 09

B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar masalah 412.31 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 412.3 selanjutnya diketahui bahwa 412.3 merupakan bagian dari 412, 412 bagian dari 410 dan 410 bagian dari 400. Disamping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi 400 Contoh :
 - a. 400 Kesejahteraan Rakyat (Perincian pertama);
 - b. 410 Bangunan Desa/Kelurahan (Perincian Kedua);
 - c. 412 Perekomian Desa (Perincian Ketiga);
 - d. 412.3 Koperasi Desa (Perincian Keempat);
 - e. 412.31 Badan Usaha Unit Desa (Perincian Kelima).
2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang paling tepat harus dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya "perihal" surat yang dicantumkan di bagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali "perihal" tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat,



bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.

3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.

4. Kode Pembantu

Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut. Dengan ditambahkan kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip. Contoh:

- a. 591 Tata Guna Tanah;
02 Kode pembantu penelitian;
- b. 591.02 Penelitian tata guna tanah;
- c. 428 Kepemudaan;
06 Kode Pembantu Seminar;
- d. 428.06 Seminar Kepemudaan.

5. Menyusun Kode

Untuk memperoleh Kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain. Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dengan pola dari 000 sampai 900. Begitu juga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola klasifikasi.

6. Apabila pada kode ada petunjuk "tambahan perincian" berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode - kode pola yang lain

Contoh I : Proyek Pasar

055 - Proyek bidang perekonomian)

511.2 - Pasar (Bidang Perekonomian)

055.112 - Proyek Pasar

Contoh II : Proyek Jembatan

056 - Proyek bidang pekerjaan umum

630 - Jembatan (Bidang Pekerjaan Umum)

056.3 - Proyek Jembatan. Angka 0 paling belakang sesuai. Titik desimal dihilangkan.



7. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu benar. Peraturan pemerintah tentang pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 188.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun. Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08).

Penelitian penghasilan Pamong desa, dapat diklasifikasi 070 (Penelitian) atau 142.02 (Penelitian penghasilan pamong desa) (142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02). Kedua cara pengklasifikasian ini sama-sama benar.

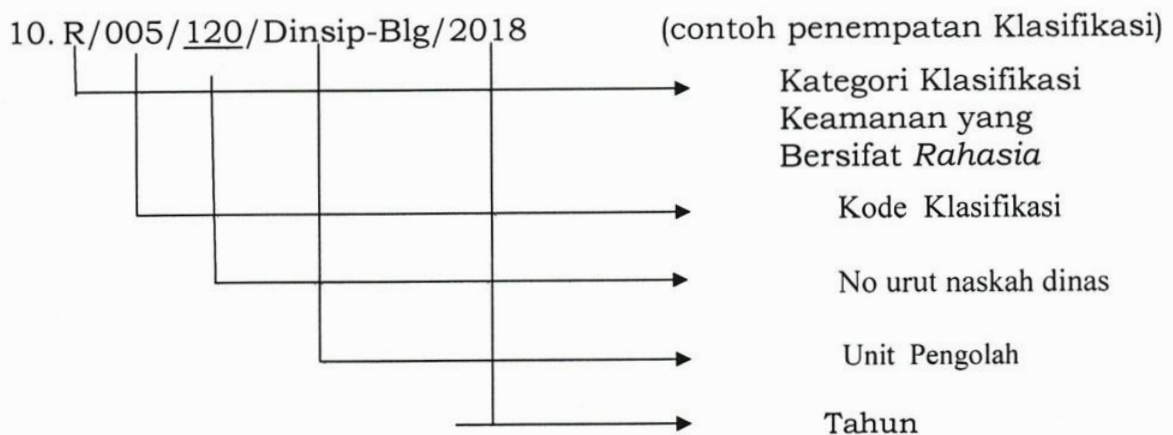
Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

8. Tunjuk Silang Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut dan mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Tunjuk Silang. Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode: Satu kode diisikan pada Kartu Kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah.

Contoh: Surat tentang "Persawahan untuk transmigrasi" dapat diberikode 521.5 (Persawahan) dengan menunjuk kode 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.

9. Indeks Kaitan

Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan. Indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya. Dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada di depan indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.



C. PERINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN

1. Perincian pertama:

- a. 000 Umum;
- b. 100 Pemerintahan;
- c. 200 Politik;
- d. 300 Keamanan/Ketertiban;
- e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
- f. 500 Perekonomian;
- g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
- h. 700 Pengawasan;
- i. 800 Kepegawaian;
- j. 900 Keuangan.

2. Perincian kedua:

- a. 000 UMUM;
- b. 010 Urusan Dalam;
- c. 020 Peralatan;
- d. 030 Kekayaan Daerah;
- e. 040 Perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan/ Sandi;
- f. 050 Perencanaan;
- g. 060 Organisasi/ Ketatalaksanaan;
- h. 070 Penelitian;
- i. 080 Konferensi;
- j. 090 Perjalanan Dinas;
- k. 100 Pemerintahan;
- l. 110 Pemerintahan Pusat;
- m. 120 Pemerintahan Provinsi;
- n. 130 Pemerintahan Kabupaten/ Kota;
- o. 140 Pemerintahan Desa/ Kelurahan;
- p. 150 DPR/ MPR;
- q. 160 DPRD Provinsi;
- r. 170 DPRD Kabupaten/ Kota;
- s. 180 Hukum;
- t. 190 Hubungan Luar Negeri;
- u. 200 Politik;
- v. 210 Kepartaian;
- w. 220 Organisasi Kemasyarakatan;
- x. 230 Organisasi Profesi dan Fungsional;
- y. 240 Organisasi Pemuda;
- z. 250 Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan;
- aa. 260 Organisasi Wanita;
- bb. 270 Pemilihan Umum;
- cc. 280 Komisi Pemilihan Umum;
- dd. 290 Badan Pengawas Pemilu;
- ee. 300 Keamanan/ Ketertiban;
- ff. 310 Pertahanan;
- gg. 320 Kemiliteran;
- hh. 330 Keamanan;
- ii. 340 Pertahanan Sipil;
- jj. 350 Kejahatan;



kk. 360	Bencana;
ll. 370	Kecelakaan;
mm. 380	-
nn. 390	-
oo. 400	Kesejahteraan Rakyat;
pp. 410	Jaring Pengaman Sosial;
qq. 420	Pendidikan;
rr. 430	Kebudayaan;
ss. 440	Kesehatan;
tt. 450	Agama;
uu. 460	Sosial;
vv. 470	Kependudukan;
ww. 480	Media Massa;
xx. 490	-
yy. 500	Perekonomian;
zz. 510	Perdagangan;
aaa. 520	Pertanian;
bbb. 530	Perindustrian;
ccc. 540	Pertambangan Kesamuderaan;
ddd. 550	Perhubungan;
eee. 560	Tenaga Kerja;
fff. 570	Permodalan;
ggg. 580	Perbankan/Moneter;
hhh. 590	Agraria;
iii. 600	Pekerjaan Umum Dan Ketenagaan;
jjj. 610	Pengairan;
kkk. 620	Jalan;
lll. 630	Jembatan;
mmm. 640	Bangunan;
nnn. 650	Tata Kota;
ooo. 660	Tata Lingkungan;
ppp. 670	Ketenagaan;
qqq. 680	Peralatan;
rrr. 690	Air Minum;
sss. 700	Pengawasan;
ttt. 710	Bidang Pemerintahan;
uuu. 720	Bidang Politik;
vvv. 730	Bidang Keamanan/Ketertiban;
www. 740	Bidang Kesejahteraan Rakyat;
xxx. 750	Bidang Perekonomian;
yyy. 760	Bidang Pekerjaan Umum;
zzz. 770	-
aaaa. 780	Bidang Kepegawaian;
bbbb. 790	Bidang Keuangan;
cccc. 800	Kepegawaian;
dddd. 810	Pengadaan;
eeee. 820	Pengangkatan dan Mutasi;
ffff. 830	Kedudukan;
gggg. 840	Kesejahteraan;



- hhhh. 850 Cuti;
 iii. 860 Penilaian;
 jjj. 870 Tata Usaha;
 kkkk. 880 Pemberhentian Pegawai;
 llll. 890 Pendidikan;
 mmmm. 900 Keuangan;
 nnnn. 910 Anggaran;
 oooo. 920 Otoritasi;
 pppp. 930 Verifikasi;
 qqqq. 940 Pembukuan;
 rrrr. 950 Perbendaharaan;
 ssss. 960 Pembinaan Kebendaharaan;
 tttt. 970 Pendapatan;
 uuuu. 980 -
 vvvv. 990 Bendaharawan;

3. Perincian Ketiga :

KODE	KLASIFIKASI
000	UMUM
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah
001.31	Daerah Provinsi
001.32	Daerah Kabupaten / Kota)
001.4	Bandir / Umbul-Umbul
002	Tanda Kehormatan / Penghargaan (Khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Monumen
002.5	Penghargaan secara adat
002.6	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura, dsb)
003	Hari Raya / Besar
003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan , Hari Anak, HKSN,dsb)
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun/HUT(Hari Jadi Provinsi/ Kabupaten/ Kota)
003.4	Hari-hari Besar Internasional
004	Ucapan
004.1	Terima Kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapan Lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Tanda Pengenal
006.3	Jabatan Lainnya
007	-
008	-
009	-



010	URUSAN DALAM
011	Gedung Kantor/ termasuk instalasi/ Prasarana Fisik Pamong Praja/ Kantor Dinas
011.1	Listrik
011.2	Telepon
011.3	Otomasi
011.4	Air Minum
011.5	Hidrant
011.6	Alarm
011.7	Internet
012	Rumah Dinas/ Tanah Rumah Dinas/ Parabot Rumah Dinas
013	Akomodasi / Persinggahan (Mess / Wisma/ hotel)
014	Rumah Susun Apartemen
015	Peminjaman sarana Prasarana Kantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, Laptop dll)
016	Pengurusan Kendaraan Dinas
017	Keamanan / Ketertiban Kantor
018	Kebersihan Kantor
019	Protokol
019.1	Upacara Bendera
019.2	Tata tempat
019.21	Pemasangan gambar Presiden/ Wakil Presiden
019.3	Audiensi
019.4	Penerimaan Tamu
019.5	Kerjasama
020	PERALATAN
020.1	Pengadaan termasuk pengumuman pengadaan, penunjuk lelang.
020.2	Proses pengadaan
020.21	Prakualifikasi : rapat persiapan, HPS, penjelasan pekerjaan/ anwijzing, negoisasi, evaluasi
020.22	SPK, Kontrak / Amandemen / Addendum, Teguran
020.23	Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
020.24	Serah Terima Pekerjaan
020.25	Pemeriksaan Pekerjaan
020.26	Perpanjangan Waktu / Ferce majore
020.27	Denda
020.28	Sanggahan
020..29	Pemeliharaan Barang / Jasa
021	Pengadaan Alat Tulis
022	Pengadaan Peralatan & Mesin Kantor
023	Pengadaan Perabot Kantor
024	Pengadaan Mobil dinas/ Alat angkutan
025	Pakaian Dinas
026	Pengadaan Senjata
027	Pengadaan Tanah
028	Pengadaan komputer
029	Inventaris
029.1	Pendataan Barang Inventaris
029.2	Laporan Barang Inventaris.
029.3	Pendapatan Barang Milik Negara
029.4	Pemeliharaan Barang Milik Negara
029.5	Penghapusan Barang Milik Negara
030	KEKAYAAN DAERAH
030.1	Penilaian asset
030.2	Peyajian neraca daerah
031	Sumber Daya Alam



032	<i>Asset Bergerak</i>
032.1	<i>Mobil Dinas Jabatan</i>
032.2	<i>Mobil Dinas Operasional</i>
032.3	<i>Kendaraan Dinas Roda 2</i>
032.4	<i>Lainnya</i>
033	<i>Asset Tidak Bergerak</i>
033.1	<i>Tanah</i>
033.2	<i>Bangunan</i>
033.3	<i>Lainya</i>
034	<i>Tanaman</i>
035	<i>Hewan</i>
036	<i>Saham/ Obligasi</i>
037	<i>Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara)</i>
038	<i>Peralatan Pabrik/Laboratorium/ Alat-Alat Berat</i>
039	<i>Peralatan Kesehatan/Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan)</i>
040	<i>PERPUSTAKAAN / KEARSIPAN / SANDI</i>
041	<i>Perpustakaan</i>
041.1	<i>Pameran Bahan Perpustakaan</i>
041.2	<i>Pengolahan (Katalog, Bibliografi)</i>
041.3	<i>Sirkulasi / layanan</i>
041.31	<i>Keanggotaan</i>
041.32	<i>Peminjaman dan Pengembalian</i>
041.4	<i>Deposit</i>
041.5	<i>Pemeliharaan, Pelestarian / alih media</i>
041.6	<i>Pembinaan Perpustakaan</i>
041.61	<i>Bantuan Buku, Rak</i>
041.7	<i>Penghapusan/ Penyusunan Bahan Perpustakaan</i>
041.8	<i>Jenis-Jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, PT, Sekolah, Keliling, Taman Bacaan Masyarakat)</i>
041.9	<i>Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan</i>
042	<i>Pengadaan Bahan Pustaka</i>
043	<i>Hunting Bahan Pustaka</i>
044	<i>Dokumentasi</i>
045	<i>Kearsipan</i>
045.1	<i>Perauran Perundangan Kearsipan</i>
045.11	<i>Tata Naskah</i>
045.12	<i>Klasifikasi Arsip</i>
045.13	<i>Jadwal Retensi Arsip</i>
045.14	<i>Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip</i>
045.15	<i>Per Undang-undangan yang lain</i>
045.2	<i>Penataan Arsip</i>
045.21	<i>Pemberkasan</i>
045.22	<i>Arsip Aktif</i>
045.23	<i>Arsip Inaktif</i>
045.24	<i>Arsip Vital</i>
045.25	<i>Arsip Statis</i>
045.3	<i>Akuisisi Arsip</i>
045.31	<i>Penyusutan Arsip</i>
045.32	<i>Penilaian Arsip</i>
045.33	<i>Pemindahan Arsip</i>
045.34	<i>Penyerahan Arsip</i>
045.35	<i>Pemusnahan Arsip</i>
045.4	<i>Pembinaan Kearsipan</i>
045.41	<i>Sosialisasi</i>
045.42	<i>Wookshop</i>
045.43	<i>Monotoring/ evaluasi Kearsipan</i>



045.44	<i>Bimbingan Kearsipan</i>
045.45	<i>Gerakan Sadar Tertib Arsip</i>
045.5	<i>Pengawasan</i>
045.6	<i>Pemeliharaan, Pelestarian / Konservasi Arsip</i>
045.61	<i>Fumigasi dan Termit Control</i>
045.62	<i>Laminasi</i>
045.63	<i>Alih Media</i>
045.7	<i>Layanan Pemasarakatan</i>
045.71	<i>Pameran</i>
045.72	<i>Pengembangan Sistem Kearsipan</i>
045.73	<i>Sistem Jaringan Informasi kearsipan</i>
048	<i>Dokumentasi</i>
049	<i>Sandi</i>
049.1	<i>Telegram, Telex, Radio, ISB</i>
049.2	<i>Data Elektronik</i>
050	PERENCANAAN DAN EVALUASI <i>Meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrebang, Musrebangpus, antar Kementerian, Musrebangnas, Musrebangdes</i>
050.1	<i>RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional)</i>
050.11	<i>RENSTRA (Rencana Strategi)</i>
050.12	<i>RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah)</i>
050.13	<i>RENSTRA BAPPEDA</i>
050.2	<i>Program Nasional</i>
050.21	<i>RKP (Rencana Kerja Pembangunan)</i>
050.22	<i>RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran kementerian Lembaga)</i>
050.23	<i>RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)</i>
050.24	<i>Rencana Kerja SKPD</i>
050.25	<i>KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran</i>
050.26	<i>Jawaban Atas Pandangan fraksi</i>
050.27	<i>Nota Keuangan</i>
050.28	<i>RKT (Rencana kerja Tahunan)</i>
050.29	<i>RKO (Rencana Kerja Operasional)</i>
050.30	-
050.3	<i>Proyek Bidang Peralatan</i>
050.4	<i>Perpustakaan/ Kearsipan/ sandi</i>
050.5	-
050.6	<i>Organisasi/ ketatalaksanaan</i>
050.61	<i>Struktur</i>
050.62	<i>Pembagian fungsi dan tugas</i>
050.7	<i>penelitian</i>
050.8	<i>Survey</i>
050.9	<i>Laporan</i>
050.91	<i>Laporan Berkala</i>
050.92	<i>LAKIP / SAKIP (Laporan / Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)</i>
050.93	<i>Evaluasi</i>
050.94	<i>Evaluasi Rencana Strategis</i>
050.95	<i>Evaluasi Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah</i>
050.96	<i>Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah</i>
050.97	<i>Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Jangka menengah Kabupaten/ Kota</i>
050.98	<i>Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</i>



051	<i>Bidang Pemerintah</i>
052	<i>Bidang Politik</i>
053	<i>Bidang Keamanan dan Ketertiban</i>
054	<i>Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>
055	<i>Bidang Perekonomian</i>
056	<i>Bidang Pekerjaan Umum</i>
057	<i>Bidang Pengawas</i>
058	<i>Bidang Kepegawaian</i>
059	<i>Bidang Keuangan</i>
060	ORGANISASI KETATALAKSANAAN
060.1	<i>Program Kerja</i>
061	<i>Organisasi Instansi Pemerintahan (struktur organisasi)</i>
061.1	<i>Susunan Organisasi dan Tata Kerja</i>
061.2	<i>Tata tertib Kantor, Termasuk Pengaturan hari dan jam kerja pegawai</i>
061.3	<i>Uraian Tugas</i>
061.4	<i>Ketentuan Pakaian Seragam Dinas dan Atribut</i>
062	<i>Organisasi Badan Non Pemerintah</i>
063	<i>Organisasi Badan Pemerintah</i>
064	<i>Organisasi Semi Pemerintah</i>
065	<i>Ketatalaksanaan / Sistem</i>
065.1	<i>Pelimpahan wewenang / Penunjukan Plt, Plh</i>
065.2	<i>Stempel Dinas dan Stempel jabatan</i>
065.3	<i>Papan nama instansi pemerintah / non pemerintah</i>
065.4	<i>Alamat-alamat Kantor dan Pejabat</i>
066	<i>Tata Hubungan Kerja / Penegakan Disiplin Aparatur</i>
067	<i>Standart Operasional Prosedur</i>
067.1	<i>Standar Pelayanan</i>
067.2	<i>Kopentensi Pelayanan</i>
067.3	<i>Pembinaan Pelayanan</i>
068	<i>Kopentensi Jabatan</i>
069	<i>Analisis Jabatan</i>
069.1	<i>Pengukuran / Penilaian beban kerja Jabatan Struktural dan Fungsional</i>
069.2	<i>Uraian Jabatan</i>
069.3	<i>Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan</i>
070	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
070.1	<i>Perizinan penelitian</i>
071	<i>Riset meliputi Riset Design, Pembahasan sampai dengan laporan akhir riset</i>
072	<i>Pengembangan</i>
072.1	<i>Krenova (Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat)</i>
072.2	<i>SINAS (Sistem Inovasi Nasional)</i>
072.3	<i>SIDA (Sistem Inovasi Daerah) Meliputi Cluster, Kabupaten, desa Inovatif</i>
072.4	<i>Inkubator Tehnologi dan Bisnis</i>
072.5	<i>Pameran Produk Inovasi / Ristek</i>
072.6	<i>BTC (Bisnis Tehnologi Center)</i>
072.7	<i>Raptek (Penerapan Iptek)</i>
072.8	<i>HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual)</i>
073	<i>Kajian</i>
073.1	<i>Kajian Strategis / diskusi / Forum Group Discussion (FGD)</i>
073.2	<i>Seminar</i>
073.3	<i>Workshop</i>
073.4	<i>Rapat Koordinasi / Rapat Teknis</i>
073.5	<i>Lokakarya</i>
073.6	<i>Diseminasi / Sosialisasi hasil Penelitian</i>

074	Kerjasama Penelitian
074.1	Instansi Pemerintah Pusat / Daerah
074.2	Perguruan Tinggi Negeri / Swasta
074.3	Lembaga swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
074.4	Lembaga Internasional
075	Perekayasaan
076	Jarlit bang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
077	Publikasi Ilmiah
077.1	Jurnal Ilmiah
080	KONFERENSI / RAPAT KOORDINASI
081	Gubernur
082	Bupati / Walikota / DPR
083	Komponen Eselon lainnya (termasuk Pimpinan SKPD)
084	Instansi Lainnya (diluar Kemendagri)
085	Internasional di dalam Negeri
086	Internasional di luar Negeri
087	Study Komparatif
088	Rapat Koordinas (Rakor)
088.1	Rakor Tingkat Provinsi
088.2	Rakor Tingkat Kab. / Kota
088.3	Rakor Tingkat Kecamatan/ Kelurahan / Desa
089	Musrimbang
090	PERJALANAN DINAS
091	Perjalanan Presiden / Wakil Presiden Ke Daerah
092	Perjalanan Menteri ke Daerah
093	Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
094	Perjalanan Dinas Kepala Daerah Provinsi
095	Perjalanan Dinas Kepala Daerah Kabupaten / Kota
096	Perjalanan Dinas Ketua/ Anggota Dewan
097	Perjalanan Dinas Pejabat Daerah dalam Daerah meliputi Surat Perintah Tugas (SPT)
097.1	Perjalanan Dinas Sekda
097.2	Perjalanan Dinas Kepala SKPD
097.3	Perjalanan Dinas Eselon III dan IV
097.4	Perjananan Dinas staf/pelaksana
098	Perjalanan Pejabat Tinggi Ke Luar Negeri
099	Perjalanan Pegawai ke Luar negeri
100	PEMERINTAHAN Meliputi : Tata Praja, Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Hubungan Luar Negeri
101	GDN (Gerakan Disiplin Nasional)
102	Good Governance
103	Laporan Harta Kekayaan Pejabat
110	PEMERINTAHAN PUSAT
111	Presiden Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
111.1	Penanggung Jawaban Presiden Kepada MPR
111.2	Amanat Presiden / Amanat Kenegaraan
112	Wakil Presiden Meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
112.1	Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
112.2	Amanat Presiden/ Amanat kenegaraan
113	Susunan Kabinet
113.1	Reshufle



113.2	Penunjukan Menteri ad Intren
113.3	Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi (lihat 500.)
114	Kementerian Dalam Negeri
114.1	Amanat Menteri Dalam Negeri
115	Kemestrian Lainnya
116	Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
117	Lembaga Non Kementerian
118	Otonomi Daerah
119	Kerjasama Antar Kemestrian
120	PEMERINTAH PROVINSI
120.01	Kebijakan Pemerintah Provinsi
120.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
120.03	Monografi, tambahan kode wilayah
120.1	Koordinasi
120.11	Satuan Kerja Perangkat Daerah
120.12	Instansi Vertikal
120.13	Kerjasama antar Provinsi / Daerah dan Luar Negeri
121	Gubernur meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya.
122	Wakil Gubernur meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
123	Sekretaris Daerah meliputi pencalonan, Pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan
124	Badan-badan Pertimbangan Daerah,
124.1	Muspida Privinsi
124.2	Forum PAN (Panitia Anggaran Provinsi)
124.3	Forum Koordinasi Lainnya
125	Pembentukan / Pemekaran Wilayah
125.1	Pembentukan Daerah Otonom
125.2	Pembentukan wilayah
125.3	Perubahan Batas Wilayah
125.4	Pemekaran Wilayah/ Pembentukan Daerah Baru
125.5	Permasalahan Batas wilayah
125.6	Pemindahan Ibu Kota Provinsi
125.7	Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Sungai, Pulau, Selat, Jalan dan sebagainya
126	Pembagian Wilayah
127	Penyerahan Urusan
128	Swaprja / Penataan Wilayah / Daerah
130	PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
130.01	Kebijakan Pemerintah Kabupaten / Kota
130.02	Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Bupati / walikota (LKPJ)
130.03	Monografi
130.1	Koodinasi
130.11	Satuan kerja Perangkat Daerah
130.12	Instansi Vertikal
130.13	Kerjasama Antar Provinsi / Daerah, dan Luar negeri (Sister city)
131	Bupati / Walikota meliputi Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
132	Wakil Bupati / Walikota meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya



133	Sekretaris Daerah meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya
134	Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah, meliputi Muspida
134.1	Muspida Kota
134.2	Forum PAN (Panitia Anggaran Kota)
134.3	Forum Koordinasi lainnya.
134.4	Kerja sama antar Kab / kota
135	Pembentukan / Pemekaran Wilayah
135.1	Pembentukan Daerah Otonom / wilayah
135.2	Perubahan Batas wilayah
135.3	Pemekaran Wilayah
135.4	Permasalahan Batas wilayah
135.5	Pembentukan Ibu Kota / Kotamadya
135.6	Pemindahan Ibukota Kabupaten / Kota
135.7	Pemberian dan Penggantian nama Kota, Daerah , jalan
136	Pembagian wilayah
137	Penyerahan Urusan
138	Pemerintahan Wilayah Kecamatan
138.1	Sambutan/pengarahan/amanat
138.2	Pembentukan Kecamatan
138.3	Pemekaran Kecamatan
138.4	Perluasan / Perubahan batas wilayah Kecamatan
138.5	Pemindahan Ibu Kota Kecamatan
138.6	Tapal batas kecamatan
139	Laporan Kecamatan
140	PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
141	Pamong Desa meliputi pencalonan, pemilihan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pelantikan, serah terima, penghasilan dsb
142	Penghasilan Pamong Desa / Kelurahan (APBDes / Kel)
143	Kekayaan Desa : bondo desa, tanah bengkok dll
144	Lembaga Tingkat Desa : Rembug desa, Badan Permusyawaratan desa, LKMD
145	Administrasi Desa/ Kelurahan : Monografi, Peta Rupa Bumi dll
146	Kewilyahan
146.1	Pembentukan Kelurahan/Desa
146.2	Pemekaran Kelurahan/Desa
146.3	Perubahan batas wilayah/perluasan Kelurahan/Desa
146.4	Perubahan nama Kelurahan/Desa
146.5	Permasalahan Batas Desa / Kelurahan
146.6	Penyatuan Desa / Kelurahan
146.7	Penghapusan Desa / Kelurahan
146.8	Kerja sama antar Kelurahan / antar Desa
147	Lembaga-lembaga Tingkat Pemerintahan Desa/ Kelurahan (lihat 410 rinciannya)
148	Perangkat Desa / Kelurahan
148.1	Kepala Desa (Kades)/ Kepala Kelurahan (Lurah)
148.2	Sekretaris Desa (Sekdes)/ Sekretaris Kelurahan (Seklur)
148.3	Kaur Desa/ Kelurahan
148.4	Kasi Desa/ Kelurahan
148.5	Staf Desa/ Kelurahan
149	Dewan Pemerintahan Desa / Kelurahan
149.1	Rukun Tetangga
149.2	Rukun Warga
149.3	Rukun Kampung
149.4	Pembentukan Rt/Rw



150	LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
151	Keanggotaan MPR
151.1	Pencalonan
151.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
151.3	Pemberhentian
151.31	Recall
151.32	Meninggal
151.4	Pelanggaran
151.5	Pergantian antar Waktu
152	Keanggotaan DPR
152.1	Pencalonan
152.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
152.3	Pemberhentian
152.31	Recall
152.32	Meninggal
152.4	Pelanggaran
152.5	Pergantian Antar waktu
153	Keanggotaan DPD
153.1	Pencalonan
153.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
154	Persidangan
154.1	Sidang Pleno
154.2	Dengar Pendapat/Hearing
154.3	Rapat Komisi
154.4	Reses
154.5	Paripurna
155	Kesejahteraan
155.1	Keuangan
155.2	Penghargaan
155.3	Tunjangan lain-lain
156	Hak
157	Jabatan Pemerintah
158	Peninjauan / Kunjungan Lapangan
159	Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi
160	DPRD PROVINSI
161	Keanggotaan
161.1	Pencalonan
161.2	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
161.3	Pelanggaran
161.4	Pemberhentian Antar Waktu
161.41	Meninggal Dunia
161.42	Mengundurkan Diri
161.43	Diberhentikan
161.5	Alat Kelengkapan Dewan
161.51	Pimpinan
161.52	Badan Musyawarah
161.53	Komisi
161.54	Badan Legislasi Daerah
161.55	Badan Anggaran
161.56	Badan Kehormatan
161.57	Alat Kelengkapan lain (pansus)
162	Persidangan
162.1	Rapat-rapat
162.11	Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
162.12	Rapat Pimpinan DPRD
162.13	Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan

	<i>Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus</i>
162.14	<i>Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi</i>
162.15	<i>Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum</i>
162.16	<i>Rapat Fraksi</i>
162.2	<i>Fraksi</i>
162.3	<i>Tata Tertip</i>
162.4	<i>Kode Etik</i>
162.5	<i>Reses</i>
162.6	<i>Peninjauan / Kunjungan Lapangan</i>
162.7	<i>Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi</i>
163	<i>Kesejahteraan</i>
163.1	<i>Keuangan</i>
163.2	<i>Penghargaan</i>
164	<i>Hak</i>
165	<i>Sekretariat DPR Provinsi</i>
170	<i>DPRD KABUPATEN / KOTA</i>
171	<i>Keanggotaan</i>
171.1	<i>Pencalonan</i>
171.2	<i>Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah</i>
171.3	<i>Pelanggaran</i>
171.4	<i>Pemberhentian Antar Waktu</i>
171.41	<i>Meninggal Dunia</i>
171.42	<i>Mengundurkan Diri</i>
171.43	<i>Diberhentikan</i>
171.5	<i>Alat Kelengkapan Dewan</i>
171.51	<i>Pimpinan</i>
171.52	<i>Badan Musyawarah</i>
171.53	<i>Komisi</i>
171.54	<i>Badan Legislasi Daerah</i>
171.55	<i>Badan Anggaran</i>
171.56	<i>Badan kehormatan</i>
171.57	<i>Alat Kelengkapan Lain (Pansus)</i>
172	<i>Persidangan</i>
172.1	<i>Rapat-Rapat</i>
172.11	<i>Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa</i>
172.12	<i>Rapat Pimpinan DPRD</i>
172.13	<i>Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus</i>
172.14	<i>Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi</i>
172.15	<i>Rapat kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum</i>
172.16	<i>Rapat Fraksi</i>
172.2	<i>Fraksi</i>
172.3	<i>Tata Tertib</i>
172.4	<i>Kode Etik</i>
172.5	<i>Reses</i>
172.6	<i>Peninjauan / Kunjungan Lapangan</i>
172.7	<i>Kunjungan Kerja / Study Banding / Konsultasi</i>
173	<i>Kesejahteraan</i>
173.1	<i>Keuangan</i>
173.2	<i>Penghargaan</i>
174	<i>Hak</i>
180	<i>HUKUM</i>
180.1	<i>Konstitusi</i>
180.11	<i>Dasar Hukum</i>



180.12	Undang-Undang Dasar
180.13	Undang-Undang
180.14	Peraturan Pemerintah
180.15	Keppres / Perpres / Inpres
180.16	Kepmen / Permen / Inmen
180.17	Perundangan tingkat Provinsi meliputi Perda, Kepgub / Pergub / Ingub
180.18	Perundangan Tingkat Kabupaten/ Kota meliputi Perda, KepBup/ KepWal, PerBup/ PerWal
180.19	Perundangan Tingkat Desa meliputi Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa
180.2	Tap MPR
180.3	Konvensi
181	Perdata
181.1	Tanah
181.2	Rumah
181.3	Utang/ Piutang
181.31	Gadai
181.32	Hipotik
181.4	Notariat
182	Pidana
182.1	Tindak Pidana Umum
182.2	Tindak Pidana Khusus
183	Peradilan
183.1	Jenis-jenis Peradilan
183.11	Peradilan Umum
183.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
183.112	Peradilan Tinggi
183.113	Mahkamah Agung
183.12	Peradilan Agama Islam
183.121	Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
183.122	Pengadilan Tinggi Agama Islam
183.123	Mahkamah Islam Agung
183.13	Peradilan Militer
183.1.31	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
183.132	Mahkamah Militer Tinggi
183.133	Mahkamah Militer Agung
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.14	Peradilan Tata Usaha Negara
183.141	Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
183.142	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
183.143	Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
183.15	Peradilan Tindak Pidana Korupsi
183.16	Peradilan Hak Asasi Manusia
183.17	Mahkamah Konstitusi
183.18	Komisi Yudisial
183.19	Ombustmen
183.2	Upaya Hukum
183.21	Banding
183.22	Kasasi
183.23	Derden Verset
183.24	Peninjauan Kembali
183.25	Grasi, Amnesti, Abolisi
183.3	Eksekusi
183.4	Pembinaan hukum, meliputi kadarkum
183.5	Bantuan Hukum, meliputi LBH



184	<i>Hukum Internasional</i>
185	<i>Imigrasi</i>
185.1	<i>Visa</i>
185.2	<i>Paspor</i>
185.3	<i>Exit</i>
185.4	<i>Reentry</i>
185.5	<i>Lintas Batas/ Batas Antar Negara</i>
186	<i>Kepenjaraan</i>
186.1	<i>Registrasi narapidana</i>
186.2	<i>Pembinaan narapidana</i>
186.3	<i>Pembebasan narapidana</i>
186.4	<i>Tahanan titipan</i>
187	<i>Kejaksaan</i>
187.1	<i>Penuntutan Umum</i>
187.2	<i>Penuntutan Khusus</i>
188	<i>Peraturan Perundang-Undangan</i>
188.1	<i>Tap MPR</i>
188.2	<i>Undang-Undang</i>
188.3	<i>Peraturan</i>
188.3.1	<i>Peraturan Pemerintah</i>
188.3.2	<i>Peraturan Menteri</i>
188.3.3	<i>Peraturan Lembaga Non Deprtemen</i>
188.3.4	<i>Peraturan Daerah</i>
188.3.41	<i>Peraturan Daerah Provinsi</i>
188.3.42	<i>Peraturan Darah Kabupaten/ kota</i>
188.4	<i>Keputusan</i>
188.41	<i>Presiden</i>
188.42	<i>Menteri</i>
188.43	<i>Lembaga Non Departemen</i>
188.44	<i>Gubernur</i>
188.45	<i>Bupati/ Walikota</i>
188.46	<i>Sekda/ Kepala Dinas/ Inpektur</i>
188.5	<i>Instruksi</i>
188.51	<i>.1 Presiden</i>
188.5.2	<i>.2 Menteri</i>
188.5.3	<i>.3 Lembaga Non Departemen</i>
188.5.4	<i>.4 Gubernur</i>
188.5.5	<i>.5 Bupati/ Walikota</i>
189	<i>Hukum Adat</i>
189.1	<i>Tokoh Adat/ Masyarakat</i>
198.2	<i>Bentuk hukum</i>
199	
190	<i>HUBUNGAN LUAR NEGERI</i>
191	<i>Perwakilan Asing/ Kedutaan/ Konjen</i>
192	<i>Tamu Negara</i>
193	<i>Kerjasama Dengan Negara Asing</i>
193.1	<i>Asean</i>
193.2	<i>Bantuan Luar Negeri</i>
194	<i>Perwakilan Ri Di Luar Negeri</i>
195	<i>PBB</i>
196	<i>Laporan Luar Negeri</i>
200	<i>POLITIK</i>
201	<i>Perencanaan dan Progra Pembinaan Politik Luar Negeri</i>
201.1	<i>Pembinaan dan Pemahaman ideologi Negara</i>
201.2	<i>Kesatuan Bangsa</i>
201.3	<i>Pelaksanaan Pembinaan Politikdaam Negeri, Laporan</i>



201.4	<i>Keadan Politik Luar Negeri</i>
201.5	<i>Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan Ipoeksosbud Hankam</i>
201.6	<i>Orde Baru</i>
201.7	<i>Orde reformasi</i>
204	<i>Verifikasi Parpol Peserta Pemilu</i>
204.1	<i>Penyelenggaraan Pemilu</i>
204.2	<i>Pendaftaran Pemilih</i>
205	<i>Penetapan Daftar Calon Pemilih Tetap</i>
206	<i>Parpol Peserta Pemilih</i>
207	<i>Pendaftaran Bakal Caleg</i>
208	<i>Penetapan Caleg</i>
209	<i>Peraturan / Tata Cara Kampanye</i>
210	KEPARTAIAN
211	<i>Partai Politik</i>
211.1	<i>Lambang Parpol</i>
211.2	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol</i>
211.3	<i>Program Kerja, Data Kerja Parpol</i>
211.4	<i>Pembinaan Parpol</i>
211.5	<i>Hasil Munas / Musda Parpol</i>
211.6	<i>Struktur/ Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan Parpol</i>
211.7	<i>Data Inventaris dan Keuangan Parpol</i>
212	<i>Partai/ Organisasi Terlarang</i>
212.1	<i>Keputusan Pembubaran partai/ organisasi terlarang</i>
212.2	<i>Daftar dan data pengurus anggota partai / organisasi terlarang</i>
212.3	<i>Ijin Meninggalkan tempat / domisili bagi anggota partai / organisasi terlarang</i>
212.4	<i>Daftar berkala mengenai Keadaan anggota partai/ organisasi terlarang</i>
212.5	<i>Laporan umum mengenai keadaan anggota partai/ organisasi terlarang</i>
213	<i>Bantua Keuangan Parpol</i>
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	<i>Pembentukan organisasi</i>
221.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
221.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
221.3	<i>Program Kerja Organisasi</i>
221.4	<i>Munas/ Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
222	<i>Pembinaan organisasi</i>
222.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
222.2	<i>Daftar inventaris kekayaan organisasi</i>
223	<i>Berdasarkan Perjuangan</i>
224	<i>Berdasarkan Kekaryaan</i>
225	<i>Berdasarkan Kerohanian</i>
226	
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
230	<i>Pembentukan organisasi</i>
230.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
230.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
230.3	<i>Program kerja organisasi</i>
230.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
231	<i>Pembinaan Organisasi</i>
231.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
231.2	<i>Daftar inventaris kekayaan organisasi</i>
232	<i>Ikatan Dokter Indonesia</i>
233	<i>Persatuan Guru Republik Indonesia</i>
234	<i>Persatuan Sarjana Hukum Indonesia</i>



235	<i>Persatuan Advokat Indonesia</i>
236	<i>Lembaga Bantuan Hukum Indonesia</i>
237	<i>Korp Pegawai Republik Indonesia</i>
238	<i>Persatuan Wartawan Indonesia</i>
239	<i>Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (Icmi)</i>
240	ORGANISASI PEMUDA
240.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
240.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
240.3	<i>Program kerja organisasi</i>
240.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
241	<i>Pembinaan Organisasi</i>
241.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
241.2	<i>Daftar Inventaris kekayaan organisasi</i>
242	<i>Komite Nasional Pemuda Indonesia</i>
243	<i>Organisasi Mahasiswa</i>
244	<i>Organisasi Pelajar</i>
245	<i>Gerakan Pemuda Anzor</i>
246	<i>Gerakan Pemuda Islam Indonesia</i>
247	<i>Gerakan Pemuda Marhaenis</i>
248	<i>Pemuda Pancasila</i>
249	<i>Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia</i>
250	ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
251	<i>Pembentukan organisasi</i>
251.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
251.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
251.3	<i>Program kerja organisasi</i>
251.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
252	<i>Pembinaan Organisasi</i>
252.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
252.2	<i>Daftar Inventaris kekayaan organisasi</i>
260	ORGANISASI WANITA
	<i>Pembentukan organisasi</i>
260.1	<i>Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga</i>
260.2	<i>Kepengurusan dan daftar anggota organisasi</i>
260.3	<i>Program kerja organisasi</i>
260.4	<i>Munas / Musda Provinsi dan Kabupaten / Kota</i>
261	<i>Pembinaan Organisasi</i>
261.1	<i>Kegiatan organisasi dan pelaporannya</i>
261.2	<i>Daftar Inventaris kekayaan organisasi</i>
262	<i>Federasi Buruh Seluruh Indonesia</i>
263	<i>Organisasi Buruh Internasional</i>
264	<i>Himpunan Kerukunan Tani Indonesia</i>
265	<i>Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia</i>
266	<i>Keluarga Supir Profesional Indonesia (Kesspi)</i>
267	<i>Kesatuan Pelaut Indonesia (Kpi)</i>
268	<i>Himpunan Pengusaha Pengerah Tenaga Kerja Indonesia</i>
269	<i>Perhimpunan Anggrek Indonesia</i>
270	PEMILU (PEMILIHAN UMUM) / PILKADA (PEMILIHAN DAERAH)
271	<i>Pendaftaran</i>
272	<i>Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu</i>
273	<i>Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilu</i>
274	<i>Pencalonan</i>
274.1	<i>Pengajuan Calon</i>
274.2	<i>Penelitian Calon</i>
274.3	<i>Penyusunan DCS (Daftar Calon Sementara)</i>
274.4	<i>Penyusunan DPT (Daftar Pemilih Tetap)</i>



274.5	<i>Pengumuman Daftar Calon</i>
274.6	<i>Nomor Urut / Tanda Gambar</i>
275	<i>Kampanye</i>
275.1	<i>Minggu Tenang</i>
275.2	<i>Dana Kampanye</i>
276	<i>Pemungutan Suara / Penghitungan Suara</i>
277	<i>Pemilih / Daftar Pemilih</i>
278	<i>Hasil Pemilu</i>
278.1	<i>Penetapan terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif</i>
278.2	<i>Penetapan pemenang pilkada</i>
279	<i>Pengucapan Supah Janji</i>
280	<i>SARANA PEMILU</i>
280.1	<i>TPS</i>
280.2	<i>Kendaraan</i>
280.3	<i>Surat Suara</i>
280.4	<i>Kotak Suara</i>
280.5	<i>Bilik Suara</i>
281	<i>Petugas Pemilu</i>
282	<i>KPU / KPUD</i>
283	<i>Badan Pengawasan Pemilu / Pilkada</i>
284	<i>Panitia Pengawas Pemilu / Pilkada</i>
285	<i>Panitia Pemungut Kecamatan / PPK</i>
286	<i>Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara / KPPS</i>
287	<i>Pemantauan</i>
288	<i>Pelanggaran</i>
289	<i>Sengketa</i>
300	<i>KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM</i>
300.1	<i>Kebijakan Pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan</i>
300.2	<i>Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan</i>
300.3	<i>Pencegahan dan penanggulangan gangguan / ancaman keamanan/ketertiban umum</i>
300.4	<i>Program kerja serta tata cara penanggulangan keamanan</i>
301	<i>Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum)</i>
302	<i>Pengawasan Trantibum</i>
303	<i>Penegakan pelaksanaan perda</i>
304	<i>Pembinaan / Penyuluhan Pelanggaran Perda</i>
305	<i>Patroli Wilayah</i>
306	<i>Laporan Kunjungan VIP, VVIP, tamu asing</i>
306.1	<i>Pengamanan</i>
306.2	<i>Pengawalan</i>
307	<i>Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan</i>
310	<i>PERTAHANAN</i>
311	<i>Darat</i>
312	<i>Laut</i>
313	<i>Udara</i>
314	<i>Ketahanan Bangsa</i>
315	<i>Ketahanan Ekonomi</i>
316	<i>Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan</i>
320	<i>KEMELITERAN/TNI</i>
321	<i>Latihan Militer</i>
322	<i>Wajib militer</i>
323	<i>Operasi militer</i>
324	<i>Kekaryaannya TNI</i>
325	<i>Kemanunggalan TNI dengan rakyat</i>



330	KEAMANAN
331	Kepolisian
331.1	Kriminal
331.2	Razia Sajak
331.3	Razia Pekat
331.4	Pidana Kaorupsi
332	Polisi Pamong Praja
332.1	Teguran
332.2	Razia kaki lima
332.3	Tindak pidana ringan
332.4	Kerjasama dengan intitusi keamanan lain
332.5	Penanganan Huru hara/ demonstrasi
332.6	Razia PSK
332.7	Razia Gepeng
332.8	Razia pekat
332.9	Projustisia
333	Pengawasan / swadaya
333.1	Kamra
333.2	Hansip
333.3	Poskamling
334	Teror/ gangguan Masyarakat
336	Perjudian
337	Surat-surat kaleng
338	Pengaduan Masyarakat
339	Himbauan/ Larangan
340	PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)
340.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Linmas
341	Pembinaan dan Diklat
341.1	Pengangkatan/ Pemberhentian Anggota Linmas
341.2	Pendidikan/ Latihan Linmas
341.3	Latihan PAM swakarsa
341.4	Pendidikan/ Latihan MENWA
342	Pengerahan dan Pengendalian Linmas
343	Kesejahteraan bagi anggota Linmas
343.1	Pemberian tali asih bagi anggota Linmas
343.2	Bantuan modal usaha bagi anggota Linmas
343.3	Santunan Uang duka bagi anggota Linmas
343.4	Penghargaan bagi anggota Linmas
344	Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa
344.1	Linmas Lanjut Usia
345	Orientasi kesadaran Bela Negara
346	Kegiatan Pelaksanaan Linmas
347	-
350	KEJAHATAN
351	Makar/ Pemberontakan/ Terorisme
352	Pembunuhan
353	Penganiyaan/ Pencurian/ Perampasan
354	Subversi/ Penyeludupan/ Narkotika
355	Penipuan dan pemalsuan
355.1	Uang
355.2	Ijazah
355.3	Kejagatan Pemalsuan Lainnya
356	Korupsi/ Penyelewengan/ Penyalahgunaan Jabatan
357	Kekerasan pada perempuan dan anak
357.1	Pelaporan
357.2	Penanganan Korban



358	<i>Kenakalan</i>
359	<i>Kejahatan Lainnya (Traficking, hipnotis, dll)</i>
360	<i>BENCANA</i>
360.1	<i>Pelatihan</i>
360.2	<i>Surat Keputusan</i>
360.3	<i>Berita Acara</i>
361	<i>Gunung Merapi/ Gempa/ Tsunami</i>
362	<i>Banjir/ Tanah longsor</i>
363	<i>Angin Topan</i>
364	<i>Kebakaran</i>
364.1	<i>Pemadam Kebakaran</i>
365	<i>Kekeringan</i>
366	<i>Darurat</i>
367	<i>Posko Bencana</i>
368	<i>Koordinasi/ unsur pengarah Penanggulangan Bencana</i>
369	<i>MOU Pemerintah Pusat BNPB</i>
370	<i>KECELAKAAN</i>
371	<i>Latihan SAR</i>
372	<i>Latihan Keterampilan Penyelamatan di air dan menyelam</i>
373	<i>Latihan Managemen bagi Pejabat</i>
374	<i>Satkorlat dan Satlak PBP</i>
375	<i>Pelatihan Kemampuan pusdalop bagi aparat PBP</i>
376	<i>Latihan keterampilan pemadam kebakaran</i>
377	<i>Kecelakaan Darat, Laut, Udara, Sungai / Danau</i>
378	<i>Investigasi/ Penyelidikan kecelakaan</i>
379	<i>Asuransi kecelakaan</i>
380	<i>PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI</i>
381	<i>Perencanaan</i>
381.1	<i>Perencanaan Teknis</i>
381.2	<i>Rekomendasi</i>
382	<i>Bantuan Bencana</i>
383	<i>Penanggulangan Bencana dengan pihak lain</i>
384	<i>Sarana prasara rehabilitasi dan rekonstruksi</i>
385	<i>PUSDALOPS</i>
386	<i>Kunjungan lapangan</i>
387	<i>Relawan</i>
388	<i>Laporan bencana</i>
390	<i>KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN</i>
391	<i>Instansi pemerintah pusat</i>
392	<i>Instansi pemerintah di daerah</i>
393	<i>Lembaga International</i>
394	<i>Lembaga non pemerintah nasional</i>
400	<i>KESEJAHTERAAN RAKYAT</i>
401	<i>Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat</i>
402	<i>Keluarga Miskin</i>
403	<i>Bantuan BLT</i>
404	<i>PNPM</i>
410	<i>BANGUNAN DESA/ KELURAHAN</i>
411	<i>Pembinaan Usaha Gotong royong</i>
411.1	<i>Swadaya Gotong Royong / Swasta Masyarakat Desa</i>
411.11	<i>Penataan Gotong Royong</i>
411.12	<i>Pungutan Desa</i>
411.2	<i>Lembaga Sosial Desa (LSD)</i>
411.21	<i>Pembinaan Rt / Rw</i>
411.22	<i>Proyek Desa</i>
411.23	<i>Musyawarah/ Musyawarah Pembangunan Desa</i>



411.24	<i>Perencanaan Partisipatif Pembangunan</i>
411.3	<i>Latihan kerja Masyarakat / Peningkatan Keterampilan</i>
411.31	<i>Kader Masyarakat</i>
411.32	<i>Kuliah Kerja Nyata (KKN)</i>
411.33	<i>Pusat Latihan</i>
411.4	<i>Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK)</i>
411.5	<i>Penyuluhan Masyarakat Desa</i>
411.6	<i>Posyandu</i>
411.7	<i>Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)</i>
412	<i>Perekonomian Desa/ Pembinaan Usaha Ekonomi Desa</i>
412.1	<i>Produksi Unggulan Desa</i>
412.11	<i>Kewirausahaan</i>
412.12	<i>Usaha Informasi</i>
412.13	<i>Angkatan Kerja Desa</i>
412.14	<i>Pengolahan</i>
412.15	<i>Pemasaran</i>
412.2	<i>Pembiayaan Pembangunan Desa</i>
412.21	<i>Pengkreditan Desa/ Usaha Ekonomi Desa</i>
412.22	<i>Inventarisasi Data</i>
412.23	<i>Bantuan / Stimulasi</i>
412.24	<i>Petunjuk/ Pembinaan Pelaksanaan</i>
412.25	<i>Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan</i>
412.26	<i>Pelaporan</i>
412.27	<i>Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)</i>
412.3	<i>Koperasi Desa</i>
412.31	<i>Badan Usaha Unit Desa (BUUD)</i>
412.32	<i>Koperasi Unit Desa (KUD)</i>
412.4	<i>Penataan Bantuan Pembangunan Desa / Bina Bantuan</i>
412.41	<i>Bantuan Desa</i>
412.42	<i>Jumlah RT/RW yang diberi bantuan</i>
412.5	<i>Alokasi Bantuan Pembangunan Desa</i>
412.6	<i>Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa</i>
412.61	<i>Bantuan Langsung</i>
413	<i>Sarana dan Prasarana Desa/ Pembinaan SDA dan Pemukiman Desa</i>
413.1	<i>Prasarana dan Sarana Desa</i>
413.11	<i>Pembinaan</i>
413.12	<i>Bimbingan Teknis</i>
413.2	<i>Pemukiman Kembali penduduk/ Bina Tata Pemukiman Pedesaan</i>
413.21	<i>lokasi</i>
413.22	<i>Diskusi</i>
413.23	<i>Pelaksanaan</i>
413.3	<i>Pemugaran perumahan dan lingkungan Desa / perumahan dan lingkungan Desa</i>
413.31	<i>Rumah Sehat</i>
413.32	<i>Proyek Perintis</i>
413.33	<i>Pelaksanaan</i>
413.34	<i>Pengembangan</i>
413.35	<i>Perbaikan kampung</i>
413.4	<i>Sumber Daya Desa</i>
413.5	<i>Peran Serta Desa</i>
413.6	<i>Teknologi Tepat Guna (TTG)</i>
414	<i>Pengembangan Desa</i>
414.1	<i>Tingkat Perkembangan Desa</i>
414.11	<i>Jumlah Desa</i>
414.12	<i>Pemekaran Desa</i>



414.13	<i>Pembentukan Desa Baru</i>
414.14	<i>Evaluasi</i>
414.15	<i>Profil Desa/ Kelurahan</i>
414.2	<i>Unit Desa Kerja Pembangunan</i>
414.21	<i>Penyusunan Program / Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan</i>
414.22	<i>Lokasi UDKP / Desa Terpilih / Desa Bermasalah</i>
414.23	<i>Pelaksanaan / Program Proyek Masuk Desa</i>
414.24	<i>Bimbingan Pembinaan</i>
414.25	<i>Evaluasi</i>
414.26	<i>Pendataan Potensi / Profil Desa</i>
414.3	<i>Tata Desa</i>
414.31	<i>Inventarisasi</i>
414.32	<i>Penyusunan Pola Tata Desa</i>
414.33	<i>Aplikasi Tata Desa</i>
414.34	<i>Pemetaan</i>
414.35	<i>Pedoman Pelaksanaan</i>
414.36	<i>Evaluasi</i>
414.37	<i>Penataan Kawasan Ruang</i>
414.38	<i>Kawasan Khusus</i>
414.4	<i>Perlombaan Desa</i>
414.41	<i>Pedoman</i>
414.42	<i>Penilaian</i>
414.43	<i>Kejuaraan</i>
414.44	<i>Piagam</i>
414.5	<i>Pengembangan Kawasan Terpadu</i>
414.51	<i>Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT)</i>
414.52	<i>Bantuan Peningkatan Prasarana Jalan Poros Desa (P2JPd)</i>
414.53	<i>Pendamping dan Sarana Pendamping Purna Waktu (SP2W)</i>
414.54	<i>Penanganan Kasus</i>
415	<i>Koordinasi</i>
415.1	<i>Sektor Khusus</i>
415.	<i>Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)</i>
415.3	<i>Team Koordinasi Pusat (TKP)</i>
415.4	<i>Kerjasama</i>
415.41	<i>Luar Negeri</i>
415.42	<i>Perguruan Tinggi</i>
415.43	<i>Kementerian/ Lembaga Pemerintah</i>
415.44	<i>Lembaga lainnya</i>
416	-
420	<i>PENDIDIKAN</i>
420.1	<i>Kebijakan dan Program Pemerintah untuk pendidikan</i>
420.2	<i>Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, jiwa nasionalisme dsb</i>
420.3	<i>Pendidikan Kemasyarakatan</i>
421	<i>Sekolah (termasuk akreditasi)</i>
421.1	<i>Pra sekolah (PAUD, Playgroup)</i>
421.2	<i>Sekolah Dasar</i>
421.3	<i>Sekolah Menengah</i>
421.4	<i>Sekolah Kejuruan</i>
421.5	<i>Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas, dll)</i>
421.6	<i>Kegiatan Sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum</i>
421.7	<i>Kegiatan Pelajar diantaranya reuni, darmawisata, widyawisata lomba-lomba (LKS, olimpiade sains, olimpiade olah raga dan sains), Pelajar teladan, Pertukaran Pelajar</i>
421.8	<i>Sekolah Pendidikan Luar Biasa</i>



421.9	<i>Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf</i>
422	<i>Administrasi Sekolah</i>
422.1	<i>Persyaratan masuk sekolah, testing, ujian, OSPEK</i>
422.2	<i>Tahun Pelajaran</i>
422.3	<i>Hari Libur</i>
422.4	<i>Uang Sekolah, diantaranya SPP, SPI</i>
422.5	<i>Bea Siswa dan Penghargaan siswa berprestasi</i>
422.6	<i>Ijazah, Sertifikat</i>
422.7	<i>Bantuan Pendidikan : Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)</i>
423	<i>Metode Belajar</i>
423.1	<i>Kuliah</i>
423.2	<i>Ceramah, Simposium, Seminar</i>
423.3	<i>Diskusi</i>
423.4	<i>Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktek/PKL</i>
423.5	<i>Kurikulum</i>
423.6	<i>Karya Tulis, Karya Ilmiah</i>
423.7	<i>Ujian</i>
423.8	<i>Silabus / kurikulum</i>
424	<i>Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, guru/dosen teladan, guru/dosen berprestasi)</i>
424.1	<i>Guru Kontrak / Guru Bantu</i>
424.2	<i>Sertifikasi Guru</i>
425	<i>Sarana Pendidikan</i>
425.1	<i>Bangunan Pendidikan</i>
425.11	<i>Gedung Sekolah</i>
425.12	<i>Kampus</i>
425.13	<i>Pusat Kegiatan</i>
425.14	<i>Perpustakaan</i>
425.15	<i>Laboratorium</i>
425.2	<i>Buku</i>
425.3	<i>Perlengkapan Pendidikan</i>
425.4	<i>Sistem Informasi Pendidikan</i>
425.5	<i>Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan</i>
426	<i>KEOLAHRAGAAN</i>
426.1	<i>Pembinaan Keolahragaan</i>
426.11	<i>Olah raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)</i>
426.12	<i>Olah raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dll)</i>
426.13	<i>Olah raga Rekreasi / Massal (Senam, sepeda santai, olahraga tradisional)</i>
426.14	<i>Iptek dan Industri Olah raga</i>
426.2	<i>Sarana Prasarana Keolahragaan</i>
426.21	<i>Gedung Olah Raga</i>
426.22	<i>Stadion</i>
426.23	<i>Lapangan</i>
426.24	<i>Kolam Renang</i>
426.3	<i>Kemitraan Olah Raga</i>
426.4	<i>KONI</i>
427	<i>Kepramukaan/Kepanduan</i>
427.1	<i>Pekemahan</i>
427.2	<i>Pembinaan Pramuka</i>
428	<i>Kepemudaan</i>
428.1	<i>Pertukaran Pemuda</i>
428.2	<i>Paskibraka</i>
428.3	<i>Sarana Prasarana Kepemudaan, meliputi sarana kegiatan remaja : gelanggang remaja</i>



428.4	<i>Kemitraan Pemuda</i>
428.5	<i>Karang Taruna</i>
429	-
430	KEBUDAYAAN
430.1	<i>Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kebudayaan</i>
430.2	<i>Pembinaan bidang kebudayaan</i>
431	<i>Kesenian</i>
431.1	<i>Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, seni tari, seni musik, seni rupa, seni lukis dll)</i>
431.2	<i>Sarana Pengembangan Kesenian</i>
431.21	<i>Gedung Kesenian</i>
431.22	<i>Padepokan</i>
431.23	<i>Lembaga Adat</i>
431.24	<i>Kegiatan adat/tradisi</i>
431.3	<i>Usaha pertunjukan, hiburan : Festival , pentas seni, promosi seni</i>
432	<i>Kepurbakalaan</i>
432.1	<i>Museum</i>
432.2	<i>Peninggalan Kuno</i>
432.21	<i>Candi, termasuk pemugaran</i>
432.22	<i>Benda Sejarah</i>
433	<i>Sejarah</i>
434	<i>Bahasa Daerah/ Nasional/ Internasional</i>
435	<i>Perizinan Pagelaran / Petunjuk Kesenian</i>
436	<i>Aliran Kepercayaan</i>
337	<i>Kesenian Adat</i>
440	KESEHATAN
440.1	<i>Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan</i>
441	<i>Pembinaan Kesehatan</i>
441.1	<i>Gigi</i>
441.2	<i>Mata</i>
441.3	<i>Jiwa</i>
441.4	<i>Kanker</i>
441.5	<i>UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)</i>
441.6	<i>Perawatan</i>
441.7	<i>Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui media PKK, Posyandu, dsb</i>
441.8	<i>Kesehatan Ibu dan Anak</i>
441.9	<i>JPSBK (Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan)</i>
441.91	<i>JAMKESMAS/ JAMKESDA / JAMPERSAL</i>
441.92	<i>Jaminan lainnya</i>
441.93	<i>Gerakan Jum'at Bersih</i>
.442	<i>Obat-obatan</i>
442.1	<i>Pengadaan</i>
442.2	<i>Pemeriksaan Obat</i>
442.3	<i>Penyimpanan Obat</i>
442.4	<i>Distribusi obat</i>
442.5	<i>Pengawasan Obat</i>
442.51	<i>Obat Generik</i>
442.52	<i>Obat Terlarang</i>
442.53	<i>Pemalsuan Obat</i>
443	<i>Pemberantasan dan pencegahan penyakit</i>
443.1	<i>Pencegahan Penyakit</i>
443.2	<i>Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P.2.M.L)</i>
443.21	<i>Kusta</i>
443.22	<i>Kelamin, HIV, HIDS, IMS</i>
443.23	<i>Frambusia</i>



443.24	T.B.C
443.25	Kolera
443.26	SARS, dan jenis penyakit lainnya
443.3	Pemberantasan penyakit menular sumber binatang (P2B)
443.31	Malaria
443.32	Dengue Heemorrhagie Fever (DHF)
443.33	Filaria
443.34	Serangga
443.35	Rabies
443.36	Antrak
443.37	Leptosirosis
443.38	Chikungunya
443.39	Penyakit lainnya
443.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
443.41	A. Pektoris
443.42	IMA (Irama Mastcmik Akut)
443.43	Hipertensi
443.44	Stroke
443.45	Diabetes Melitus
443.46	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Serviks
443.47	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Mammae
443.48	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Hepar
443.49	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA.Paru, Dan Penyakit Lainnya
443.5 .	Epidemiology dan Karantina (Epidka)
443.51	Imunisasi
443.52	Surveilanse
443.53	Pestisida
443.54	Pencemaran udara
443.55	Jamban Keluarga
443.56	Kesehatan Institusi
443.6	Higiene sanitasi
443.61	Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan minuman (TPPMM), jasa boga
443,62	Sarana air minum
443.63	Pestisida, insektisida
443.64	Pencemaran
443.65	Jamban keluarga, Sanitasi rumah tangga
443.66	Kesehatan institusi, Misal : Poskestren, Sanitasi masjid dll
443,67	Higiene sanitasi CA. Mammae
443.68	Higiene sanitasi CA. Hepar
443.69	Higiene sanitasi CA. Paru
443.7	Kejadian khusus
443.71	Dekopensatiokordosis (Serangan jantung)
443.72	Asma
443.73	Psikosis
443,74	PPOM
443.75	Kecelakaan Lalu Lintas
443.76	Kejadian Luar Biasa (KLB)
444	Gizi dan Pengawasan Makanan
444.1	Kekurangan Makanan
444.2	Bahaya kelaparan, busung lapar ,gizi busuk
444.3	Keracunan Makanan
444.4	Menu makanan rakyat
444.5	Badan Pebaikan Gizi Daerah (BPGD)
444.6	Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS)



444.7	<i>Gondok endemic (GAKI)</i>
445	<i>RSU, RSJ, RS Khusus, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling</i>
445.1	<i>Pelayanan Medis (Termasuk surat keterangan berkaitan dengan kondisis pasien, visum)</i>
445.11	<i>Rawat Inap</i>
445.12	<i>Rawat Jalan</i>
445.13	<i>IGD</i>
445.14	<i>IBS</i>
445.15	<i>ICU</i>
445.16	<i>MCU (Medical Check Up)</i>
445.2	<i>Penunjang Medis</i>
445.21	<i>Farmasi</i>
445.22	<i>Rekam Medik</i>
445.23	<i>Radiologi</i>
445.24	<i>Gizi</i>
445.25	<i>Laboratorium Klinik</i>
445.26	<i>Laboratorium Patologi Anatomi,Forensik</i>
445.27	<i>Bank Daerah Rumah Sakit</i>
445.28	<i>Sanitasi Rumah Sakit</i>
445.29	<i>CSSD / Laundry</i>
445.3	<i>Keperawatan</i>
445.4	<i>Komite Medik</i>
445.5	<i>SPI (Satuan Pengawas Internal)</i>
445.6	<i>Mutu Rumah Sakit</i>
445.61	<i>Akreditasi</i>
445.62	<i>ISO</i>
445.63	<i>PSBH (Problem Solving For Better Hospital)</i>
445.64	<i>IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)</i>
445.7	<i>IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah)</i>
445.8	<i>Promosi Layanan Kesehatan</i>
445.9	<i>Kasus Hukum Rumah Sakit</i>
446	<i>Tenaga Medis</i>
446.1	<i>Perencanaan Tenaga Medis</i>
446.2	<i>Pendayagunaan Tenaga Medis</i>
446.21	<i>Perijinan Untuk Tenaga Medis</i>
446.22	<i>Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis</i>
446.23	<i>TKHI (Tenaga Kesehatan Haji Indonesia)</i>
446.3	<i>Diklat Tenaga Kesehatan / Medis</i>
446.4	<i>Diklat Tenaga Kesehatan / Para Medis</i>
446.5	<i>Pendidikan di Bidang Kesehatan Termasuk Pendidikan Spesialis</i>
447	<i>Peralatan Kesehatan</i>
447.1	<i>Standarisasi</i>
447.2	<i>Penyimpanan</i>
447.3	<i>Distribusi</i>
447.4	<i>Perijinan Berkaitan Dengan Alat Kesehatan</i>
448	<i>Pengobatan Alternatif</i>
448.1	<i>Pijat</i>
448.2	<i>Akupunktur</i>
448.3	<i>Jamu dan Herbal</i>
448.4	<i>Dukun</i>
449	<i>Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan</i>
449.1	<i>PUSKESMAS dan PUSKESMAS Keliling</i>
449.2	<i>Poliklinik dan Balai Kesehatan</i>
449.3	<i>Rumah Bersalin</i>
449.4	<i>Posyandu</i>
449.5	<i>Laboratorium Kesehatan</i>



449.6	Apotik
449.7	Sanatorium Kesehatan
450	AGAMA
450.1	Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Keagamaan
450.2	Bantuan dibidang Keagamaan
451	Islam
451.1	Peribadatan
451.11	Sholat
451.12	Zakat, Infaq, Shodaqoh
451.13	Puasa
451.14	Umroh dan Haji
451.2	Rumah Ibadah (Masjid, Musholla, Surau)
451.3	Tokoh Agama
451.4	Pendidikan Agama
451.41	Pendidikan Tinggi Agama
451.42	Menengah , MTs, MA
451.43	Dasar, Pra Sekolah, MI
451.44	Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/ Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dll)
451.45	Sarana Pendidikan Meliputi Buku, Gedung Sekolah dll
451.46	Tenaga Pengajar
451.47	Dakwah (Pengajian, MTQ)
451.5	Wakaf
451.6	Mazhab Agama Islam
451.7	Organisasi Keagamaan bukan politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dll)
451.8	Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
452	Kristen Protestan
452.1	Peribadatan
452.2	Rumah Ibadah Gereja dll
452.3	Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dll)
452.4	Mazhab Agama Kristen Protestan
452.5	Organisasi Gerejani
453	Khatolik
453.1	Peribadatan
453.2	Rumah Ibadah Gereja dll
453.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
453.4	Mazhab Agama Khatolik
453.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
454.1	Peribadatan
454.2	Rumah Ibadah Pura dll
454.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
454.4	Mazhab Agama Hindu
454.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
455.1	Peribadatan
455.2	Rumah Ibadah Candi, Vihara dll
455.3	Tokoh Agama, Rohaniawan
455.4	Mazhab Agama Budha
455.5	Organisasi Agama Budha
456	Aliran Sesat
460	SOSIAL
461	Rehabilitasi penyandang Cacat
461.1	Cacat Ganda



461.2	Cacat Fisik
461.3	Cacat Mental
462	Rehabilitasi Sosial
462.1	Gelandangan/orang terlantar, anak jalanan
462.2	Pengemis
462.3	Tuna susila
462.4	Anak nakal
462.5	Tuna wisma
463	Kesejahteraan anak dan keluarga
463.1	Anak Putus Sekolah
463.11	Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA)
463.12	Perlindungan Anak
463.13	Anak Asuh
463.2	Kualitas Hidup Perempuan
463.21	Perlindungan Perempuan
463.22	Ibu Teladan
463.23	Pengarusutamaan Gender (PUG)
464	Keperintisan dan Kepahlawanan
464.1	Pahlawan meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya
464.2	Perintis kemerdekaan meliputi Pembinaan, penghargaan dan tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan
464.3	Cacat Veteran
465	Kesejahteraan Sosial
465.1	Lanjut Usia
465.2	Korban kekacauan, pengungsian, rehabilitasi
465.3	Masyarakat miskin: Raskin, BLT dll
466	Sumbangan sosial
466.1	Korban bencana
466.11	Jaminan sosial
466.2	Pencairan dana untuk sumbangan : Penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazaar dsb
466.3	Panti Asuhan
467	Bimbingan sosial
467.1	Masyarakat suku terasing meliputi : bimbingan pendidikan, kesehatan, pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya
468	PMI
469	Makam
469.1	Umum
469.2	Pahlawan
469.3	Khusus, Keluarga, Raja
469.4	Krematorium
470	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
470.1	Kebijakan dan Program Pemerintah untuk kependudukan
471	PENDAFTARAN PENDUDUK
471.1	Identitas Penduduk
471.11	Biodata
471.12	Nomor Induk Kependudukan
471.13	Kartu Tanda Penduduk
471.1.4	Kartu Keluarga
471.15	Advokasi Identitas Penduduk
471.2	Perpindahan Penduduk dalam wilayah Indonesia
471.21	Perpindahan Penduduk WNI
471.22	Perpindahan Penduduk WNA dalam wilayah Indonesia
471.23	Perpindahan Penduduk WNA dan WNI tinggal sementara



471.24	<i>Daerah Terbelakang</i>
471.25	<i>Bedol Desa</i>
471.3	<i>Perpindahan Penduduk Antar Negara</i>
471.31	<i>Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri</i>
471.32	<i>Orang asing tinggal sementara</i>
471.33	<i>Orang asing tinggal tetap</i>
471.34	<i>Perpindahan penduduk antar Negara diwilayah perbatasan antar negara (pelintas batas tradisional)</i>
471.4	<i>Pendaftaran pengungsi dan penduduk rentan</i>
471.41	<i>Akibat bencana alam</i>
471.42	<i>Akibat kerusuhan sosial</i>
471.43	<i>Pendaftaran penduduk daerah terbelakang</i>
471.44	<i>Pendaftaran penduduk rentan</i>
472	PENCATATAN SIPIL
472.1	<i>Kelahiran kematian dan advokasi</i>
472.11	<i>Kelahiran</i>
472.12	<i>Kematian</i>
472.13	<i>Advokasi Kelahiran dan Kematian</i>
472.2	<i>Perkawinan, perceraian dan advokasi</i>
472.21	<i>Perkawinan Agama Islam</i>
472.22	<i>Perkawinan Agama non Islam</i>
472.23	<i>Perceraian Agama Islam</i>
472.24	<i>Perceraian Agama non Islam</i>
472.25	<i>Advokasi Perkawinan dan Perceraian</i>
472.3	<i>Pengangkatan pengakuan dan pengesahan anak serta perubahan dan pembatalan akta dan advokasi</i>
472.31	<i>Pengangkatan anak</i>
472.32	<i>Pengakuan anak</i>
472.33	<i>Pengesahan anak</i>
472.34	<i>Perubahan akta</i>
472.35	<i>Pembatalan akta</i>
472.36	<i>Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak Serta Perubahan dan Pembatalan Akta</i>
472.4	<i>Pencatatan Kewarganegaraan</i>
472.41	<i>Akibat perkawinan</i>
472.42	<i>Akibat kelahiran</i>
472.43	<i>Non Perkawinan/ Non kelahiran</i>
472.44	<i>Naturalisasi</i>
472.45	<i>Perubahan WNI ke WNA</i>
473	INFORMASI KEPENDUDUKAN
473.1	<i>Teknologi Informasi</i>
473.2	<i>Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia</i>
473.21	<i>Daerah Maju</i>
473.22	<i>Daerah Berkembang</i>
473.23	<i>Daerah Terbelakang</i>
473.3	<i>Pengolahan Data Kependudukan</i>
473.31	<i>Pendaftaran Penduduk</i>
473.32	<i>Kejadian vital penduduk</i>
473.33	<i>Penduduk non registrasi</i>
473.4	<i>Pelayanan informasi kependudukan</i>
473.41	<i>Media Elektronik</i>
473.42	<i>Media Cetak</i>
473.43	<i>outlet</i>
474	PERKEMBANGAN PENDUDUK
474.1	<i>Pengarahan Kuantitas Penduduk</i>
474.11	<i>Struktur Jumlah</i>



474.12	<i>Komposisi</i>
474.13	<i>Fertilitas</i>
474.14	<i>Kesehatan Reproduksi</i>
474.15	<i>Morbiditas Penduduk</i>
474.16	<i>Mortalitas Penduduk</i>
474.2	<i>Pengembangan Kuantitas Penduduk</i>
474.21	<i>Anak dan remaja</i>
474.22	<i>Penduduk usia produktif</i>
474.23	<i>Penduduk lanjut usia</i>
474.24	<i>Gender</i>
474.3	<i>Penataan Persebaran Penduduk</i>
474.31	<i>Migrasi antar wilayah</i>
474.32	<i>Migrasi Internasional</i>
474.33	<i>Urbanisasi</i>
474.34	<i>Sementara</i>
474.35	<i>Migrasi non Permanen</i>
474.4	<i>Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk</i>
474.41	<i>Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk</i>
474.42	<i>Pelayanan Kelembagaan Ekonomi</i>
474.43	<i>Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya</i>
474.44	<i>Partisipasi Masyarakat</i>
474.5	<i>Pengembangan Wawasan Kependudukan</i>
474.51	<i>Pendidikan Jalur Sekolah</i>
474.52	<i>Pendidikan Jalur Luar Sekolah</i>
474.53	<i>Pendidikan Jalur Masyarakat</i>
475	TRANSMIGRASI
475.1	<i>Penyiapan informasi daerah transmigrasi</i>
475.11	<i>Informasi potensi peluang bekerja dan berusaha didaerah transmigrasi</i>
475.12	<i>Perbandingan potensi daerah asal dan daerah transmigrasi</i>
475.13	<i>Permasyarakatan/ sosialisasi transmigrasi</i>
475.14	<i>Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi</i>
475.15	<i>Publikasi transmigrasi melalui pameran dan kesenian</i>
475.16	<i>Bimbingan dan penyuluhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi</i>
475.17	<i>Kerjasama dibidang transmigrasi</i>
475.18	<i>Kepulangan transmigrasi karena daerah terjadi konflik</i>
475.2	<i>Pemukiman transmigrasi</i>
475.21	<i>Penggunaan tanah pemukiman transmigrasi</i>
475.22	<i>Pengembangan, struktur wilayah & analisis data wilayah transmigrasi</i>
475.23	<i>Tata ruang satuan kawasan pengembangan, study kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi</i>
475.24	<i>Teknis ruang satuan pemukiman dan lokasi/peta informasi pemukiman</i>
475.25	<i>Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigrasi, fasilitas umum/ sosial dan jaringan transportasi</i>
475.26	<i>Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah</i>
475.27	<i>Penyelesaian masalah tanah di lokasi pemukiman transmigrasi</i>
475.28	<i>Tata ruang pemukiman transmigrasi</i>
475.281	<i>Rancangan dan pemanfaatan areal tanah</i>
475.282	<i>Rancangan kapling TSM</i>
475.283	<i>Pengukuran dan pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum</i>



475.284	<i>Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah</i>
475.285	<i>Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah</i>
475.286	<i>Pengukuran batas unit pemukiman</i>
475.287	<i>Penyelesaian perubahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah</i>
475.29	<i>Sarana pemukiman transmigrasi</i>
475.291	<i>Pembinaan dan pengadiln, penyiapan bangunan rumah transmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum</i>
475.292	<i>Pembinaan dan pengendalian penyiapan sarana air bersih</i>
475.293	<i>Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi</i>
475.294	<i>Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana</i>
475.295	<i>Pembinaan , pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan</i>
475.3	<i>Pengerahan, pemindahan dan penempatan</i>
475.3.1	<i>Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan</i>
475.32	<i>Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan</i>
475.33	<i>Pengerahan</i>
475.331	<i>Pendaftaran dan seleksi calon transmigran</i>
475.332	<i>Berkas persyaratan dan administrasi calon transmigran</i>
475.333	<i>Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan</i>
475.34	<i>Pemberangkatan transmigran</i>
475.341	<i>Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat</i>
475.342	<i>Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan</i>
475.343	<i>Pelaksanaan pengurusan pemberangkatan</i>
475.344	<i>Pengawalan perjalanan transmigran</i>
475.345	<i>Pengaturan rute pemberangkatan</i>
475.346	<i>Alokasi penempatan dan surat perintah pemberangkatan</i>
475.35	<i>Penempatan transmigran</i>
475.351	<i>Kesiapan lokasi dan daya tampung</i>
475.352	<i>Pendataan transmigran di lokasi yang masih dibina</i>
475.353	<i>Data transmigran yang meninggalkan lokasi di setiap UPT</i>
475.354	<i>Pemantauan penempatan transmigrasi pengganti</i>
475.4	<i>Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran</i>
475.4.1	<i>Pelatihan transmigran</i>
475.411	<i>Program pengajaran dan metode pelatihan</i>
475.412	<i>Penyusunan silabus dan modul pelatihan</i>
475.413	<i>Penyusunan calon peserta/pelatih</i>
475.42	<i>Penampungan transmigran di transito</i>
475.421	<i>Pelayanan kesehatan bagi transmigran</i>
475.422	<i>Pelayanan makanan bagi transmigran</i>
475.423	<i>Pelayanan pembekalan/peralatan bagi transmigran</i>
475.5	<i>Pembinaan masyarakat transmigrasi</i>
475.5.1	<i>Identifikasi dan penjajagan pembinaan</i>
475.511	<i>Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap penyesuaian</i>
475.512	<i>Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pengembangan</i>
475.513	<i>Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan</i>
475.52	<i>Pembinaan Pendidikan</i>
475.521	<i>Penyediaan/penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan</i>
475.522	<i>Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan status</i>
475.53	<i>Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat</i>
475.54	<i>Pembinaan kesehatan</i>
475.541	<i>Penyediaan sarana kesehatan dan KB</i>



475.542	<i>Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa</i>
475.543	<i>Pendistribusian bantuan pangan</i>
475.55	<i>Pembinaan rokhani</i>
475.551	<i>Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama</i>
475.552	<i>Bimbingan adaptasi masyarakat</i>
475.553	<i>Bimbingan pelaksanaan penumbuhan interaksi sosial</i>
475.56	<i>Pelayanan pos di daerah transmigrasi</i>
475.57	<i>Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan</i>
475.58	<i>Penilaian transmigran teladan</i>
475.59	<i>Pemantauan dan penilaian kelayakan usaha</i>
476	KELUARGA BERENCANA
476.1	<i>Alat Kontrasepsi</i>
476.2	<i>Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri</i>
476.3	<i>Penyuluh Lapangan KB (PLKB)</i>
476.4	<i>Pos KB desa</i>
476.5	<i>Akseptor KB</i>
477	-
478	-
479	-
480	MEDIA MASSA
480.1	<i>Kebijakan dan program Pemerintah dalam bidang media massa</i>
481	<i>Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran</i>
481.1	<i>Surat kabar</i>
481.2	<i>Majalah</i>
481.3	<i>Buletin</i>
481.4	<i>Jurnal</i>
481.5	<i>Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik</i>
481.51	<i>Perindustrian Perdagangan termasuk 9 harga pokok</i>
481.52	<i>Perekonomian dan Perbankan</i>
481.53	<i>Bidang lainnya</i>
481.6	<i>Layanan informasi/ Leaflet</i>
481.7	<i>Masukan Analisis Gubernur</i>
482	<i>Media Elektronik meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran</i>
482.1	<i>Radio</i>
482.2	<i>Televisi</i>
482.3	<i>Film Dokumenter</i>
482.4	<i>Pengawasan Lembaga Penyiaran</i>
482.5	<i>Kelompok Pemantau Isi Siaran</i>
482.6	<i>Pengkajian Isi Siaran</i>
482.7	<i>SDM Penyiaran</i>
483	<i>Periklanan</i>
483.1	<i>Ketentuan Pemasangan Reklame</i>
483.2	<i>Pameran</i>
484	<i>Kewartawanan/ Jurnalistik</i>
484.1	<i>Pembentukan Organisasi Profesi</i>
484.2	<i>Kasus-kasus kewartawanan</i>
484.3	<i>Penyalahgunaan Profesi</i>
484.4	<i>Bantuan kepada/ dari organisasi Profesi Wartawan</i>
484.5	<i>Musyawarah Wartawan Indonesia</i>
484.6	<i>Pendidikan Jurnalistik khusus wartawan</i>
484.7	<i>Temu Pers/ Konferensi Pers</i>
484.8	<i>Pers Tour</i>
484.9	<i>Kunjungan Wartawan Asing</i>
485	<i>Penyuluhan Masyarakat</i>



485.1	Publikasi
485.2	Pendirian information center
486	Pembinaan bidang Infokom
486.1	Training Fotografi
486.2	Training Berita Jurnalistik
486.3	Bintek Infokom
486.4	Rakorda Infokom
486.5	Rakor Pengendalian Kegiatan
486.6	Pengelolaan Website Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
487	Hubungan Antar Lembaga
487.1	Non Pemerintah
487.11	Wahana Komunikasi Masyarakat
487.12	Lembaga Komunikasi Masyarakat
487.2	Lembaga Pemerintah
487.21	Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
487.22	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
487.3	Luar negeri
487.31	Promosi Luar negeri
487.32	Kunjungan Wartawan asing
488	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
489	Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
489.1	Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interaktif
489.2	Dialog Interaktif
489.3	Rubrik
489.4	Materi/ pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif
489.5	Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan
490	PENGADUAN LEWAT MEDIA
491	Tanggapan Balik atas Pengaduan
492	Publikasi
493	Bantuan Publikasi
494	
495	
500	PEREKONOMIAN
500.1	Dewan stabilitasi
501	Dewan Stabilisasi
501.1	Pengadaan Pangan
501.11	Ketersediaan Pangan
501.12	Akses Pangan
501.13	Kerawanan Pangan Pencegahan dan penanggulangan Kerawanan Pangan
501.131	Pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan)
501.132	Pengembang Daerah Rawan Pangan (PDRP)
501.133	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
501.2	Distribusi dan Cadangan Pangan
501.21	Distribusi Pangan
501.22	Harga Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perizinan pada umumnya. Untuk perizinan sesuai Bidang, Klasifikasi pada masalahnya
504	Statistik
510	PERDAGANGAN
510.1	Promosi perdagangan
510.11	Pekan raya
510.12	Iklan



510.13	<i>Pameran</i>
510.14	<i>Event-event</i>
510.15	<i>Lomba-lomba (lomba desain, busana, kerajinan)</i>
510.2	<i>Pelelangan, distribusi</i>
510.21	<i>Pemasaran Sembako</i>
510.22	<i>Pemasaran hasil industri</i>
510.23	<i>Penentuan harga pokok</i>
510.3	<i>Bina usaha dan sarana Perdagangan</i>
510.31	<i>Renana dan program Kerja</i>
510.32	<i>Pelaksanaan Pelayanan administrasi</i>
510.33	<i>Pelaksanaan Teknis</i>
510.34	<i>Pemantauan</i>
510.35	<i>Evalusi dan Pelaporan</i>
510.4	<i>Perijinan (HO, Gangguan, Reklame, dll)</i>
510.41	<i>Pernerbitan SIUP</i>
510.42	<i>Perpanjangan</i>
510.43	<i>Ijin prinsip</i>
510.44	<i>Rekomendasi</i>
510.5	<i>Perdagangan antar pulau / kabupaten</i>
510.51	<i>Kerjasama bahan baku</i>
510.52	<i>Industri pemasaran</i>
510.53	<i>Kontrak</i>
510.6	<i>T e r a</i>
510.61	<i>Tera dan Tera ulang</i>
510.62	<i>Takaran</i>
510.63	<i>Timbangan dan anak Timbangan</i>
510.64	<i>Kalibrasi</i>
510.65	<i>Cap tanda tera</i>
510.66	<i>Biaya tera</i>
510.7	<i>Bantuan Peralatan</i>
510.71	<i>Proposal</i>
510.72	<i>Surat Perjanjian / Kontrak</i>
510.73	<i>Serah Terima</i>
510.8	<i>Perijinan / Rekomendasi Tanda Pabrik</i>
510.9	<i>Kemetrologian</i>
510.91	<i>Standart Tingkat Tiga</i>
510.92	<i>Standart Kerja Satuan Ukuran</i>
510.93	<i>Ukuran Metrologi</i>
510.931	<i>Peralatan</i>
510.932	<i>Laboratorium Metrologi Legal</i>
510.933	<i>Tanki Ukur Mobil</i>
510.934	<i>Meter Taxi</i>
510.935	<i>KWH Meter termasuk didalamnya listrik dan PDAM</i>
510.936	<i>S P B U</i>
511	<i>Pemasaran</i>
511.1	<i>Sembilan bahan pokok diantaranya beras, garam, minyak tanah, minyak goreng, sabun dll</i>
511.2	<i>Pasar</i>
511.3	<i>Pertokoan, kaki lima, kios</i>
511.4	<i>Pusat perbelanjaan</i>
512	<i>Ekspor</i>
512.1	<i>Ekspor Hasil Industri</i>
512.2	<i>Ijin Ekspor</i>
512.3	<i>Pengembangan Pasar Luar Negeri</i>
512.4	<i>Managemen Perdagangan Internasional</i>
512.5	<i>Eksport Hasil Industri</i>



512.51	<i>Kebijakan</i>
512.52	<i>Pemasaran</i>
512.6	<i>Pemberitahuan Eksport Barang</i>
512.7	<i>Pengawasan Mutu Barang</i>
512.8	<i>Eksportir Terdaftar</i>
512.9	<i>Evaluasi dan pelaporan</i>
513	<i>Impor</i>
513.1	<i>Ijin Impor</i>
513.11	<i>Pemberian ijin</i>
513.12	<i>Pengendalian ijin</i>
513.2	<i>Standart Mata Dagang Import</i>
513.3	<i>Management Perdagangan Internasional</i>
513.4	<i>Kegiatan Import</i>
513.41	<i>Pembinaan Import</i>
513.42	<i>Pengendalian Import</i>
513.43	<i>Pemantauan Import</i>
513.5	<i>Faktor-faktor Pendukung</i>
513.6	<i>Pengawasan mutu Barang Import</i>
513.7	<i>Penyaluran Kegiatan Import</i>
513.71	<i>Bahan Konsumsi</i>
513.72	<i>Bahan Baku</i>
513.73	<i>Bahan Penolong</i>
513.8	<i>Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Imprt</i>
514	<i>Perdagangan Antar Pulau</i>
514.1	<i>Kerjasama Bahan baku</i>
514.2	<i>Industri Pemasaran</i>
514.3	<i>Kontrak</i>
515	<i>Pengembangan Pontesi Perdagangan Luar Negeri</i>
515.1	<i>Promosi dan Informasi</i>
515.2	<i>Pameran</i>
515.3	<i>Kerjasama</i>
516	<i>Pergudangan , termasuk tangki penyimpanan minyak goreng</i>
516.1	<i>Peti kemas</i>
516.2	<i>Tangki Penyimpanan</i>
517	<i>Aneka Usaha Perdagangan</i>
518	<i>KOPERASI</i>
518.1	<i>Bina Usaha Koperasi</i>
518.11	<i>Koperasi Pertanian</i>
518.12	<i>Koperasi Non Pertanian</i>
518.13	<i>Permodalan Koperasi</i>
518.131	<i>Pemupukan Modal</i>
518.132	<i>Pemanfaatan Modal</i>
518.133	<i>Perbankan dan Asuransi</i>
518.134	<i>Permodalan Luar Koperasi</i>
518.135	<i>Kredit Program Umum</i>
518.136	<i>Kredit Program Khusus</i>
518.14	<i>Distribusi dan Jasa Koperasi</i>
518.141	<i>Distribusi Bahan Pokok</i>
518.142	<i>Distribusi Aneka Bahan</i>
518.143	<i>Distribusi Kerjasama Niaga</i>
518.144	<i>Jasa Angkutan</i>
518.145	<i>Jasa Perumahan</i>
518.146	<i>Aneka Jasa</i>
518.15	<i>Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi</i>
518.2	<i>Bina Lembaga Koperasi</i>
518.21	<i>Organisasi Koperasi</i>



518.211	Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
518.212	Pemberian Badan Hukum Koperasi
518.213	Penyelesaian Pembubaran Koperasi
518.214	Keragaan Koperasi
518.215	Pengakuan Koperasi Sekolah
518.216	Amalgamasi
518.217	Tertib Organisasi Koperasi
518.218	Penyelesaian Penyelesaian/ Persengketaan
518.219	Bimbingan Kesadaran Hukum
518.22	Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
518.221	Rapat Anggota Tahunan Koperasi
518.222	Pengurus dan Badan Pemeriksa
518.223	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
518.224	Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
518.23	Bina Tata Laksana Koperasi
518.231	Klasifikasi Koperasi Pedesaan
518.232	Klasifikasi Koperasi Perkotaan
518.233	Klasifikasi Koperasi Sekunder
518.24	Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
518.241	Administrasi Koperasi Pedesaan
518.242	Administrasi Koperasi Perkotaan
518.243	Karyawan/ Maneger Koperasi
518.244	Sumber Daya Manusia
518.245	Tenaga Kerja Sukarela Terdidik(TKST)
518.246	Penyaluran Alat Sekolah
518.247	Bantuan Pemda Kepada Koperasi/ KUD
518.25	Akuntansi
518.251	Akuntansi Koperasi Pedesaan
518.252	Akuntansi Koperasi Perkotaan
518.253	Akuntansi Koperasi Sekunder
518.26	Pengawasan Koperasi
518.261	Pengawasan Koperasi Primer
518.262	Pengawasan Koperasi Sekunder
518.263	Koperasi Jasa Audit
518.264	Kerjasama Kantor Akuntansi
518.27	Penyuluhan Koperasi
518.271	Pembinaan Kader Koperasi
518.272	Masyarakat Umum
518.273	Forum Komunikasi
518.274	Kelompok Tani
518.275	Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
518.276	Penilaian Tingkat Nasioanl
518.3	Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
518.31	Pembinaan Usaha
518.311	Pembinaan Usaha Mikro
518.312	Pembinaan Usaha Kecil
518.313	Pembinaan Usaha Menengah
518.32	Pengawasan Usaha
518.321	Pengawasan Usaha Mikro
518.322	Pengawasan Usaha Kecil
518.323	Pengawasan Usaha Menengah
520	PERTANIAN
520.1	Orasarana dan Sarana Pertanian
520.11	Perluasan dan pengelolaan lahan
520.12	Basis Data Lahan
520.13	Pengendalian Lahan



520.14	<i>Optimalisasi, Rehabilitasi dan konservasi Lahan</i>
520.15	<i>Perluasan Lahan</i>
520.2	<i>Pengelolaan Irigasi</i>
520.2	<i>Pembiayaan Pertanian</i>
520.3	<i>Pupuk dan peptisida</i>
520.4	<i>Alat dan Mesin Pertanian</i>
521	<i>Tanaman Pangan</i>
521.1	<i>Pembenihan Tanaman Pangan</i>
521.11	<i>Penilaian Varietas</i>
521.12	<i>Pengawasan Mutu Benih</i>
521.13	<i>Produksi Benih serelia</i>
521.14	<i>Produksi Benih Aneka Umbi</i>
521.15	<i>Budidaya Serelia (Padi dan Non Padi)</i>
521.16	<i>Budidaya Aneka Kacang dan Umbi</i>
521.17	<i>Perlindungan Tanaman Pangan</i>
521.18	<i>Pascapanen Tanaman Pangan</i>
521.2	<i>Hortikultura</i>
521.21	<i>Pembenihan Hortikultura</i>
521.211	<i>Pembenihan Tanaman Buah</i>
521.212	<i>Pembenihan Tanaman Sayur</i>
521.213	<i>Pembenihan Tanaman Obat</i>
521.214	<i>Pembenihan Florikultura</i>
521.215	<i>Penilaian Varietas</i>
521.216	<i>Pengawasan Mutu Benih</i>
521.22	<i>Teknologi Budidaya</i>
521.221	<i>Tanaman Buah</i>
521.222	<i>Tanaman Sayur</i>
521.223	<i>Tanaman Obat</i>
521.224	<i>Tanaman Florikultura</i>
521.23	<i>Bimbingan Usaha Budidaya</i>
521.231	<i>Tanaman Buah</i>
521.232	<i>Tanaman Sayur</i>
521.233	<i>Tanaman Obat</i>
521.234	<i>Tanaman Florikultura</i>
521.24	<i>Teknologi Pascapanen</i>
521.25	<i>Srana Pascapanen</i>
521.26	<i>Teknologi Perlindungan Hortikultura</i>
521.27	<i>Penegendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Hortikultural</i>
521.28	<i>Dampak Perubahan Iklim</i>
521.29	<i>Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Pertanian</i>
521.3	<i>Pengelolaan Pemasaran Hasil Pertanian</i>
521.31	<i>Pengelolaan Hasil Pertanian</i>
521.32	<i>Mutu dan Standar</i>
521.33	<i>Pengembangan Usaha dan Investasi</i>
521.34	<i>Pemasaran</i>
522	<i>Kehutanan</i>
522.1	<i>Perencanaan Hutan</i>
522.11	<i>Survey</i>
522.111	<i>Survey PPA</i>
522.112	<i>Survey Areal</i>
522.113	<i>Survey Pembinaan Hutan</i>
522.114	<i>Survey Potensi Hutan</i>
522.12	<i>Pendataan/ Inventarisasi Areal Hutan</i>
522.121	<i>Data Areal Tata Guna Hutan</i>
522.122	<i>Data Areal Konservasi</i>
522.2	<i>Tata Guna Hutan</i>



522.21	Tata Ruang Kawasan
522.211	Pengurusan Kawasan Hutan
522.212	Penafsiran Hutan
522.213	Mutasi Hutan
522.22	Tata Hutan
522.221	Tata Hutan Sementara
522.222	Tata Hutan Tetap
522.223	Pembukaan Hutan
522.23	Pengukuran dan Pemetaan
522.3	Pengusahaan Hutan
522.31	Data Areal HPH
522.311	SK HPH
522.312	Kerja Sama
522.313	Pembatalan/ Penolakan
522.32	Modal dan Peralatan
522.321	Inventarisasi Logging
522.322	Inventarisasi Industri
522.323	Peralatan
522.324	Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
522.325	Pemegang Saham
522.326	Neraca Perusahaan
522.33	Rencana Kerja
522.331	KHPH
522.332	RKPH
522.34	Perpanjangan HPH
522.35	Produksi
522.351	Target Produksi
522.352	Produksi Kayu
522.353	Industri Non- Kayu
522.36	Industri
522.361	Industri Kayu HPH
522.362	Industri Kayu Non-HPH
522.363	Industri Non Kayu
522.37	Pembinaan HPH
522.371	Pelanggaran dan Sanksi
522.38	Pembangunan Hutan Tanaman Industri
522.381	Hutan Tanaman Industri Pulp
522.382	HTI Pertukaran
522.39	Iuran Hutan
522.4	Sarana Usaha
522.41	Standarisasi
522.411	Kayu
522.412	Non Kayu
522.42	Pengujian Hasil Hutan
522.43	Pengembangan
522.431	Pengembangan Perusahaan
522.432	Pengembangan Pemasaran
522.44	Pemasaran Hasil Hutan
522.45	SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan
522.451	Sarana dan Prasarana
522.452	Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
522.46	Tata Usaha Hasil Hutan
522.47	PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat)
522.5	Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
522.5.1	Konservasi Jenis



522.511	Satwa yang Dilindungi
522.512	Satwa yang Tidak Dilindungi
522.513	Lembaga Konservasi Satwa
522.514	Lembaga Konservasi Tumbuhan
522.52	Kawasan Konservasi
522.521	Cagar Alam (termasuk laut)
522.522	Suaka Margasatwa
522.523	Taman Wisata (termasuk laut)
522.524	Taman Nasional
522.525	Taman hutan Raya / Kebun Raya
522.526	Taman Baru
522.527	Hutan Lindung
522.53	Pengkajian Lingkungan
522.531	Amdal UKL, UPL, Di Dalam Kawasan
522.532	Amdal UKL, UPL, Di Luar Kawasan
522.54	Bina Cinta Alam
522.541	Kelompok Pecinta Alam
522.542	Kader Konservasi Sumber Daya Alam
522.543	Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam
522.544	LSM Lingkungan
522.55	Pengamanan Hutan
522.551	Jaga Wana
522.552	PPNS
522.553	Gangguan Keamanan Hutan
522.554	Bencana Alam
522.555	Kebakaran Hutan
522.556	Sengketa Hutan
522.557	Hama dan Penyakit
522.558	Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
522.559	Alat dan Mesin Kehutanan
522.6	Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
522.61	Pembenihan
522.611	Tegakan Benih
522.612	Pengadaan Benih
522.613	Pengujian dan Penyimpanan Benih
522.614	Lalu Lintas Angkutan Benih
522.615	Pembibitan
522.616	Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat
522.617	Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat
522.62	Tanaman Reboisasi
522.621	Lahan Kritis
522.622	Reboisasi Lahan HPH
522.623	Rehabilitasi Tanah Hutan
522.624	Konservasi Tanah dan Air
522.625	Pengendalian Perladangan
522.626	Penghijauan
522.627	Aneka Usaha Kehutanan
522.63	Perhutanan Sosial
522.631	Sutera Alam
522.632	Minyak Kayu Putih
52.633	Perlebahan
522.7	Hutan Produksi
522.71	Hutan Produksi Terbatas
522.72	Hutan Produksi yang Dapat Dikonservasi
522.8	Kawasan Lindung
523	Perikanan



523.1	Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan
523.11	Penyuluhan
523.12	Teknologi
523.2	Produksi Perikanan
523.21	Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
523.22	Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC
523.23	Sertifikasi Kesehatan ikan
523.3	Usaha Perikanan
523.31	Pelatihan Nelayan
523.32	Pembinaan Wanita Nelayan
523.33	Fasilitas Perijinan : SIUP, SIPI, SKP
523.34	Perbenihan
523.4	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan
523.41	Ekspor Hasil Perikanan
523.42	Impor Hasil Perikanan
523.43	Pemasaran Dalam Negeri
523.44	Pengusaha perikanan
523.5	Sarana perikanan
523.51	Pelabuhan Perikanan Pantai
523.52	TPI/PPI
523.53	Kesyahbandaran
523.54	Peralatan penangkapan : kapal, perahu, jaring, pump dsb
523.6	Pengendalian hama dan penyakit
523.61	Penyakit ikan
523.62	Hama ikan
523.63	Obat-obatan termasuk sertifikasinya
523.7	Konservasi dan Suaka Laut
523.71	Transplantasi bibit karang
523.72	Terumbu karang
523.73	Mangrove
523.74	Garam
523.75	Harta karun di dalam laut
523.76	Pembinaan/ Pendidikan masyarakat pesisir
524	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
524.01	Produksi
524.1.1	Perbibitan
524.1.2	Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
524.1.3	Budidaya
524.2	Usaha Peternakan
524.2.1	Pelayanan Usaha
524.2.2	Pengolahan Hasil dan Pemasaran
524.2.3	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
524.3	Kesehatan Hewan
524.3.1	Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
524.3.2	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
524.3.3	Obat-obatan Hewan
524.3.4	Pelayanan Kesehatan Hewan
524.4	Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
524.4.1	Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan
524.4.2	Hygieni dan Sanitasi
524.4.3	Produk Hewani
524.5	Laboratorium Kesehatan Hewan
524.5.1	Pengujian Mutu Asal Hewan
524.5.2	Pengujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan
524.6	Inseminasi Buatan



524.6.1	<i>Produksi Distribusi dan Pemasaran</i>
524.6.2	<i>Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi</i>
524.7	<i>Pembibitan dan Budi Daya Ternak</i>
524.71	<i>Ternak Non Ruminansia</i>
524.72	<i>Ternak Ruminansia</i>
525	<i>Perkebunan</i>
525.1	<i>Pembenihan</i>
525.11	<i>Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih</i>
525.111	<i>Pelaporan</i>
525.112	<i>Monitoring</i>
525.113	<i>Statistik Perkebunan</i>
525.12	<i>Produksi Benih</i>
525.121	<i>Karet</i>
525.122	<i>T e h</i>
525.123	<i>Tembakau</i>
525.124	<i>Tebu</i>
525.125	<i>Cengkeh</i>
525.126	<i>Kelapa/ Kopra/ Kelapa sawit</i>
525.127	<i>Kopi</i>
525.128	<i>Kakao</i>
525.129	<i>Jenis Tanaman yang lain</i>
525.13	<i>Kelembagaan Benih</i>
525.131	<i>Kelompok tani</i>
525.132	<i>Kemitraan</i>
525.133	<i>Rekomendasi ijin usaha perkebunan</i>
525.2	<i>Bubidaya Perkebunan</i>
525.21	<i>Penyiapan dan Penerapan Teknologi Bubidaya Tanaman Semusim</i>
525.22	<i>Penyiapan dan Penerapan Teknologi Bubidaya Tanaman rempah</i>
525.23	<i>Penyiapan dan Penerapan Teknologi Bubidaya Tanaman Tahunan</i>
525.3	<i>Perlindungan Tanaman</i>
525.31	<i>Organisme Pengganggu Tumbuhan</i>
525.311	<i>Hama</i>
525.312	<i>Pestisida</i>
525.32	<i>Iklm dan Pencegah Kebakaran</i>
525.321	<i>Agensia Pengendalian Hayati</i>
525.4	<i>Alat dan Mesin Perkebunan</i>
525.41	<i>Power Sprayer</i>
525.42	<i>Hand Sprayer</i>
525.43	<i>Polibag</i>
525.44	<i>Alat Laboratorium Perkebunan</i>
525.45	<i>Reagen</i>
525.46	<i>Sarana/ Alat Produksi Perkebunan</i>
525.47	<i>Pengolahan lahan</i>
525.471	<i>Terasing</i>
525.5	<i>Pembinaan Usaha</i>
525.51	<i>Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanjutan</i>
525.511	<i>Sosialisasi</i>
525.512	<i>Penyuluhan / Informasi</i>
525.52	<i>Gangguan Usaha dan Penanganan Komplik</i>
526	<i>Ketahanan pangan</i>
526.1	<i>Program Bimbingan Massal</i>
526.2	<i>Pengembangan Sarana Sumber Daya</i>
526.2.1	<i>Pembinaan Teknologi</i>
526.2.2	<i>Sarana Produksi dan Permodalan</i>
526.2.3	<i>Kelembagaan</i>
526.	<i>Agrobisnis</i>



526.3	Mutu Hasil
526.3.1	Pengelola Hasil Pangan
526.3.2	Pemasaran Hasil
526.3.3	Kementriaan
526.4	Distribusi Pangan
526.4.1	Sistem dan pola Distribusi
526.4.2	Sarana dan Prasarana Distribusi
526.4.3	Pengadaan dan Cadangan Pangan
526.5	Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
526.5.1	Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
526.5.2	Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
526.5.3	Sistem Informasi Pangan
527	Penyuluhan dan Pengembangan SDM
527.1	Penyuluhan
527.11	Program dan Kerjasama Meliputi : Kebijakan Teknis, rencana dan Program, Kerjasama, pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyuluh
527.12	Informasi dan Materi Penyuluh
527.13	Kelembagaan Penyuluh
527.131	Struktural
527.132	Non Struktural
527.14	Ketenagaan Penyuluh
527.15	Kelembagaan Petani
527.151	Kelompok Petani
527.152	Gapoktan
527.153	Kelompok Taruna Tani
527.154	Kelompok Tani Lainnya
527.16	Usaha Tani
527.161	Pelaku Utama Pelaku Usaha
527.162	Promosi/Pameran/Kampanye
527.163	Penghargaan/Lomba
528	
529	
530	PERINDUSTRIAN
530.1	Undang-undang Gangguan
531	Industri Logam
532	Industri Mesin/Elektronik
533	Industri Kimia/Farmasi
534	Industri Tekstil
535	Industri Makanan/minuman
536	Aneka Industri/Perusahaan
536.1	Home Industri
537	Aneka Kerajinan
537.1	Kerajinan Rakyat
538	Usaha Negara
538.1	Perjan
538.2	Perum
538.3	Persero
539	Perusahaan Daerah/ BUMD
5391	PDAM
539.2	PLN
539.3	Bank Umum
539.4	BPD
540	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
541	Minyak dan Gas Bumi
541.1	Pengusahaan



541.11	Perijinan
541.12	Rekomendasi
541.13	Kontrak Karya
541.14	Pengolahan
541.2	Penyaluran
541.3	Tangki, Pompa, Tanker
542	Energi
542.1	Energi alternatif
542.11	Gas Rawa
542.12	Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
542.13	Biogas
542.14	Energi baru terbarukan
542.15	Perijinan
542.16	Rekomendasi
542.17	Pembinaan dan Pengawasan
542.2	Konservasi Energi
542.3	Pemetaan Energi
542.4	Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
543	Pertambangan, mineral dan batubara
543.1	Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
543.11	WIUP Batuan
543.12	WIUP Bukan Logam
543.13	WIUP Logam
543.14	WIUP Batubara
543.2	Rekomendasi Teknis
543.3	Perijinan
543.31	IUP Eksplorasi
543.32	IUP Operasi Produksi
543.33	IUP Operasi Produksi Khusus
543.34	Ijin Usaha Jasa Pertambangan
543.35	Pencabutan Ijin
543.4	Pembinaan
543.5	Pengawasan
543.51	Pengawasan Usaha Pertambangan
543.52	Penerbitan Kegiatan Pertambangan
543.6	Pasca Tambang
543.61	Reklamasi
543.62	Penutupan
544	Air tanah
544.1	Cekungan Air Tanah (CAT)
544.11	Pemetaan CAT
544.12	Imbuhan CAT
544.13	Lepasan CAT
544.14	Konservasi
544.15	Pengendalian Daya Rusak
544.2	Rekomendasi Teknis
544.3	Sumur Artesis
544.4	Sumur Bor
544.5	Sumur Gali (Pasak)
544.6	Pengusaha Pengebor (APATINDO)
544.7	Sumur Pantau
544.8	Harga Dasar Air/ Nilai Perolehan Air
544.9	Hidrologi
545	Geologi
545.1	Pemetaan
545.2	Mitigasi Bencana Geologi



545.3	<i>Vulkanologi</i>
545.31	<i>Pengawasan Vulkanologi</i>
545.32	<i>Panas Bumi</i>
545.4	<i>Hidrogeologi</i>
545.5	<i>Gerakan Tanah (Longsoran, amblesan)</i>
545.6	<i>Pengawasan, pengendalian</i>
546	<i>Hidrologi</i>
547	<i>Kesamudraan</i>
548	<i>Penghematan Energi</i>
550	<i>PERHUBUNGAN</i>
551	<i>Perhubungan Darat</i>
551.1	<i>Lalu lintas jalan raya, sungai, danau</i>
551.11	<i>Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu</i>
551.12	<i>Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)</i>
551.13	<i>Kecelakaan Lalu Lintas</i>
551.2	<i>Angkutan Jalan Raya</i>
551.21	<i>Perizinan</i>
551.22	<i>Terminal</i>
551.23	<i>Alat Angkutan</i>
551.24	<i>Jembatan Timbang/ Lebih Muatan</i>
551.25	<i>Uji Mutu</i>
551.3	<i>Angkutan Sungai</i>
551.31	<i>Keselamatan, Rambu-rambu</i>
551.32	<i>Lalu Lintas</i>
551.33	<i>Alur dan Kolam Pelabuhan</i>
551.34	<i>Trayek</i>
551.35	<i>Sarana/ Kapal</i>
551.36	<i>Pelabuhan</i>
551.37	<i>Terminal</i>
551.38	<i>Kecelakaan</i>
551.39	<i>Perizinan</i>
551.4	<i>Angkutan Danau</i>
551.41	<i>Keselamatan, Rambu-rambu</i>
551.42	<i>Lalu Lintas</i>
551.43	<i>Alur dan Kolam Pelabuhan</i>
551.44	<i>Trayek</i>
551.45	<i>Sarana/ Kapal</i>
551.46	<i>Pelabuhan</i>
551.47	<i>Terminal</i>
551.48	<i>Kecelakaan</i>
551.49	<i>Perizinan</i>
551.5	<i>Perkereta-Apian</i>
551.51	<i>Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie</i>
551.52	<i>Prasarana (Jalan/ Jembatan)</i>
551.53	<i>Trayek</i>
551.54	<i>Angkutan Penumpang</i>
551.55	<i>Angkutan Barang</i>
551.56	<i>Keselamatan</i>
551.57	<i>Kecelakaan</i>
551.58	<i>Perawatan/ Perbaikan</i>
551.59	<i>Perizinan</i>
552	<i>Perhubungan Laut</i>
552.1	<i>Lalu Lintas Angkutan Laut</i>
552.11	<i>Pelayaran Dalam Negeri</i>
552.12	<i>Pelayaran Luar Negeri</i>
552.13	<i>Pelayaran Haji</i>



552.14	<i>Pelayaran Charter/ Wisata Turis</i>
552.15	<i>Pelayaran Khusus</i>
552.16	<i>Keamanan Lalu Lintas, Rambu-rambu</i>
552.2	<i>Perkapalan-Alat Angkutan</i>
552.21	<i>Kapal Penumpang</i>
552.22	<i>Kapal Barang</i>
552.23	<i>Kapal Perang/ Patroli/ Negara</i>
552.24	<i>Kapal Tanker</i>
552.25	<i>Ponton/ Tongkang</i>
552.26	<i>Kapal Layar</i>
552.27	<i>Kapal Layar Motor</i>
552.28	<i>Kapal Kontainer</i>
552.3	<i>Pelabuhan</i>
552.31	<i>Tanah/ Lokasi</i>
552.32	<i>Alur Layar</i>
552.33	<i>Dermaga</i>
552.34	<i>Terminal Penumpang</i>
552.35	<i>Terminal Kontainer</i>
552.36	<i>Bangunan/ Gedung/ Gudang</i>
552.37	<i>Perlengkapan Tambat Labuh</i>
552.38	<i>Lapangan Penumpukan</i>
552.39	<i>Pelabuhan Khusus/ Dermaga Khusus</i>
552.4	<i>Pengerukan/ Perawatan</i>
552.41	<i>Alur Pelayaran</i>
552.42	<i>Kolam Pelabuhan</i>
552.43	<i>Reklamasi Pantai</i>
552.44	<i>Dumping Area</i>
552.45	<i>Pekerjaan Bawah Air (Salvage)</i>
552.5	<i>Penjagaan Pantai</i>
552.51	<i>Patroli Bandar</i>
552.52	<i>Patroli Perairan</i>
552.53	<i>Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)</i>
552.6	<i>Angkutan Barang</i>
552.61	<i>P O S</i>
552.62	<i>Minyak</i>
552.63	<i>L o g</i>
552.64	<i>Ternak</i>
552.65	<i>Sembilan Bahan Pokok</i>
552.66	<i>Peti Kemas / EMKL</i>
552.67	<i>Muatan Umum</i>
552.68	<i>Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri</i>
552.69	<i>Bongkar Muatan</i>
552.7	<i>Keselamatan</i>
552.71	<i>Rambu-rambu/ Mercu suar</i>
552.72	<i>Kelaikan Kapal/ Pembangunan Kapal</i>
552.73	<i>Fasilitas Keselamatan/ Keamanan</i>
552.74	<i>Telekomunikasi Pelayaran</i>
552.75	<i>Sertifikasi Kesempurnaan Kapal</i>
552.76	<i>Sertifikasi Awak Kapal</i>
552.8	<i>Kecelakaan, Gangguan</i>
552.81	<i>Kecelakaan Penumpang/ Kapal</i>
552.82	<i>Kecelakaan Barang</i>
552.83	<i>Gangguan Sarana/ Prasarana</i>
552.84	<i>Pembajakan/ Penyeludupan</i>
552.85	<i>Pencemaran</i>
552.9	<i>Perijinan</i>



552.91	<i>Ijin Berlayar</i>
552.92	<i>Ijin Pekerjaan Bawah Air</i>
552.93	<i>Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal</i>
552.94	<i>Ijin Pembukaan Kantor Cabang</i>
552.95	<i>Ijin Usaha Angkutan Laut</i>
552.96	<i>Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut</i>
552.97	<i>Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan</i>
552.98	<i>Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus</i>
552.99	<i>Ijin Pembangunan Dermaga Khusus</i>
553	<i>Perhubungan Udara</i>
553.1	<i>Lalu Lintas Angkutan Udara</i>
553.11	<i>Penerbangan Domestik</i>
553.12	<i>Penerbangan Luar Negeri</i>
553.13	<i>Penerbangan Haji</i>
553.14	<i>Penerbangan Charter/ Non Reguler</i>
553.15	<i>Penerbangan Khusus/ Jembatan Udara</i>
553.2	<i>Pelabuhan Udara</i>
553.21	<i>Tanah/ Lokasi</i>
553.22	<i>Landasan</i>
553.23	<i>Apron</i>
553.24	<i>Terminal Penumpang</i>
553.25	<i>Terminal Cargo</i>
553.26	<i>Bangunan/ Gedung</i>
553.27	<i>Perlengkapan</i>
553.28	<i>Parkir Kendaraan</i>
553.3	<i>Alat Angkutan</i>
553.31	<i>Pesawat Udara</i>
553.32	<i>Helikopter</i>
553.4	<i>Angkutan Barang</i>
553.41	<i>P o s</i>
553.42	<i>Muatan Dalam Negeri</i>
553.43	<i>Muatan Luar Negeri</i>
553.44	<i>EMPU</i>
553.5	<i>Sertifikasi Kelaikan</i>
553.51	<i>Kelaikan Pesawat Udara</i>
553.52	<i>Kelaikan Peralatan Penunjang</i>
553.53	<i>Kelaikan Personil/ Awak Kapal</i>
553.6	<i>Keselamatan</i>
553.61	<i>Rambu-rambu</i>
553.62	<i>Perakitan/ Kalibrasi</i>
553.63	<i>Fasilitas Keselamatan</i>
553.64	<i>Telekomunikasi Penerbangan</i>
553.7	<i>Kecelakaan/ Gangguan</i>
553.71	<i>Kecelakaan Penumpang</i>
553.72	<i>Kecelakaan Barang</i>
553.73	<i>Gangguan Sarana/ Prasarana</i>
553.74	<i>Pembajakan</i>
553.75	<i>Pencemaran</i>
553.8	<i>Umum</i>
553.81	<i>Asuransi</i>
553.82	<i>Asosiasi</i>
553.83	<i>SATPAM</i>
553.84	<i>Rally Udara/ Lomba</i>
553.9	<i>Perizinan</i>
553.91	<i>Izin Terbang/ Flight Approval</i>
553.92	<i>Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU</i>



553.93	<i>Pembukaan Kantor Cabang</i>
553.94	<i>Rekomendasi Ketinggian Bangunan</i>
553.95	<i>Pembangunan Bandar Udara Khusus</i>
554	<i>POS</i>
554.1	<i>Pembinaan</i>
554.11	<i>Kebutuhan fasilitas</i>
554.12	<i>Rehabilitasi/Perawatan</i>
554.13	<i>Bina Usaha/Pengawasan/Penerbitan</i>
554.14	<i>Standarisasi Perangkat</i>
554.15	<i>Tanah/Bangunan</i>
554.16	<i>Filateli</i>
554.17	<i>Asosiasi</i>
554.18	<i>Laporan dan Evaluasi</i>
554.2	<i>Pelayanan</i>
554.21	<i>Jasa pos</i>
554.22	<i>Jasa titipan</i>
554.23	<i>Jasa giro</i>
554.24	<i>Benda pos/perangko</i>
554.25	<i>Sampul peringatan</i>
554.26	<i>Jasa pos Elektronik</i>
554.3	<i>Perijinan</i>
554.31	<i>Rekomondasi usaha Jasa pos/Titipan</i>
554.32	<i>Pembukaan Agen/Cabang</i>
554.4	<i>Gangguan Sarana dan Prasarana</i>
554.41	<i>Kecelakaan</i>
554.42	<i>Sabotase</i>
554.43	<i>Penyeludupan</i>
555	<i>Teknologi Informasi</i>
555.1	<i>Kebijakan</i>
555.2	<i>Peralatan</i>
555.21	<i>Telepon</i>
555.22	<i>Internet/USO</i>
555.23	<i>Telegram, Telex/SBB,Faximile</i>
555.24	<i>Satelit, Stasiun Bumi</i>
555.25	<i>Radio Kumunikasi</i>
555.3	<i>Sistem</i>
555.4	<i>Pembinaan / Penertiban</i>
555.5	<i>Perijinan</i>
556	<i>Pariwisata dan Rekreasi</i>
556.1	<i>Usaha Pariwisata</i>
556.11	<i>Usaha Jasa Pariwisata</i>
556.111	<i>Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata</i>
556.112	<i>Restoran dan Rumah Makan</i>
556.12	<i>Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata</i>
556.13	<i>Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata</i>
556.14	<i>Usaha Sarana Pariwisata</i>
556.141	<i>Ijin Pariwisata</i>
556.142	<i>Ijin Usaha Pariwisata</i>
556.143	<i>Ijin Usaha Jasa Pariwisata</i>
556.144	<i>Ijin Pengusaha Objek dan Daya Tarik Wisata</i>
556.145	<i>Ijin Usaha Sarana</i>
556.15	<i>Wisatawan</i>
556.151	<i>Wisatawan Nusantara</i>
556.152	<i>Wisatawan Mancanegara</i>
556.16	<i>Promosi dan Informasi Pariwisata</i>
556.161	<i>Dalam Negeri</i>



556.162	<i>Luar Negeri</i>
556.2	<i>Perhotelan</i>
556.21	<i>Status Hotel</i>
556.22	<i>Kelas Hotel</i>
556.23	<i>Tarif</i>
556.3	<i>Travel Service</i>
556.31	<i>Pramu Wisata</i>
556.32	<i>Biro Perjalanan / Angkutan Wisata</i>
556.33	<i>Souvenir</i>
556.34	<i>Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina)</i>
556.4	<i>Tempat Rekreasi</i>
556.41	<i>Obyek dan Daya Tarik Wisata</i>
556.411	<i>Ciptaan Tuhan</i>
556.412	<i>Hasil Karya Manusia</i>
556.42	<i>Rehabilitasi / Perawatan</i>
556.43	<i>Pengembangan Fasilitas</i>
556.44	<i>Tanah / Bangunan</i>
556.45	<i>Bina Usaha</i>
556.46	<i>Institusi</i>
556.461	<i>Asosiasi</i>
556.462	<i>Lembaga kepariwisataan</i>
557	<i>Metereologi</i>
557.1	<i>Curah Hujan</i>
557.2	<i>Hujan Buatan</i>
557.3	<i>Peneropongan Bintang</i>
560	<i>TENAGA KERJA</i>
560.1	<i>Data Permintaan TKI / TKW Dari Luar Negeri</i>
560.11	<i>Data Persediaan TKI / TKW Dari Daerah</i>
560.2	<i>Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI</i>
560.3	<i>Rekrutmen Calon TKI / TKW</i>
560.4	<i>Seleksi Naker Ke Luar Negeri</i>
560.41	<i>Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI / TKW</i>
560.42	<i>Berkas Persyaratan Calon TKI / TKW</i>
560.43	<i>Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI / TKW</i>
560.5	<i>Persyaratan Naker TKI / TKW</i>
560.51	<i>Permohonan Rekomendasi Passport</i>
560.52	<i>Perjanjian Kerja TKI/TKW</i>
560.53	<i>Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)</i>
560.54	<i>Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri</i>
560.55	<i>Pelatihan TKI/TKW</i>
560.6	<i>Pemberangkatan Naker</i>
560.61	<i>Pemberangkatan ke Luar Negeri</i>
560.62	<i>Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri</i>
560.63	<i>Berita Acara Serah Terima TKI/TKW</i>
560.7	<i>Pemulangan Naker</i>
560.71	<i>Kepulangan TKI/TKW karena Kontraknya Habis</i>
560.72	<i>Pemulangan TKI/TKW Ilegal</i>
560.73	<i>TKI/TKW Terkena Kasus Pidana</i>
561	<i>Upah</i>
561.1	<i>Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/ Nasional</i>
561.2	<i>Pemohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/ Kota dan Provinsi</i>
561.3	<i>Kebutuhan Fisik Minuman</i>
561.4	<i>Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur)</i>
561.5	<i>Laporan Data Remittance</i>



561.6	<i>Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW</i>
562	<i>Penempatan</i>
562.1	<i>Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)</i>
562.11	<i>Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)</i>
562.12	<i>Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional</i>
562.13	<i>Pengembangan Kesempatan Berusaha/Peluasan Kerja</i>
562.2	<i>Kesepakatan Kerja Bersama</i>
562.3	<i>Lembaga Penyalur Naker</i>
562.31	<i>Ijin Pendirian Lembaga Penyaluran Naker Antar Kerja Lokal/ Daerah Dan Antar Kerja Negara (AKAN)</i>
562.32	<i>Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/ BKS/ BKK)</i>
562.33	<i>Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)</i>
563	<i>Latihan Kerja</i>
563.1	<i>Pendidikan Pekerja</i>
563.11	<i>Pendidikan dan Latihan Kerja</i>
563.12	<i>Diklat di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)</i>
563.13	<i>Diklat di Luar Negeri (Pemagangan)</i>
563.2	<i>Sarana dan Prasarana Latihan Kerja</i>
563.21	<i>Tempat Pelatihan (BLK)</i>
563.22	<i>Instruktur/ Pelatihan</i>
563.23	<i>Modul/ Silabus dan Bahan Praktek</i>
563.24	<i>Kurikulum dan Metode Pengajaran</i>
563.25	<i>Sertifikat</i>
563.3	<i>Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja</i>
564	<i>Tenaga Sukarela</i>
564.1	<i>Butsi</i>
564.2	<i>Padat Karya</i>
565	<i>Perselisihan Pekerja</i>
565.1	<i>Perselisihan dan Perkara Hukum Naker</i>
565.11	<i>Pengaduan Perkara Pekerja / NAKER</i>
565.12	<i>Pemeriksaan Perkara Pekerja / NAKER</i>
565.13	<i>Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja / NAKER</i>
565.14	<i>Sidang Perkara Perselisihan Pekerja / NAKER</i>
565.15	<i>Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)</i>
565.16	<i>Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/ P4P)</i>
565.17	<i>Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2K (PAD/ P4P)</i>
565.18	<i>Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K (PAD/ P4P)</i>
565.2	<i>Pemogokan/ Unjuk Rasa Tenaga Kerja</i>
566	<i>Keselamatan Kerja</i>
566.1	<i>Instalasi Proteksi Kebakaran</i>
566.2	<i>Pemakaian Alat Keselamatan Kerja</i>
566.3	<i>Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam bekerja</i>
566.4	<i>Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</i>
566.5	<i>Pelatihan/ Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja</i>
566.6	<i>Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes</i>
566.7	<i>Gangguan Lingkungan Tempat Usaha</i>
566.8	<i>Perlengkapan Sarana Kerja</i>
566.81	<i>Pemasangan dan Pemakaian Lift (pesawat angkat/ angkut)</i>
566.82	<i>Pemasangan dan Pemakaian Uap (ketel uap)</i>
566.83	<i>Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel</i>
566.84	<i>Pemasangan dan Pemakaian tangki tak bertekanan</i>
566.85	<i>Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran</i>
566.9	<i>Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk malam hari (shifht malam)</i>
567	<i>Pemutusan Hubungan Kerja</i>
567.1	<i>Pengaduan PHK sepihak</i>



567.2	PHK massal
567.3	Bantuan hukum bagi pekerja yang di PHK
567.4	Ijin melakukan PHK
567.5	Perhitungan masa kerja bagi pekerja yang di PHK
567.6	Pemberian uang tunggu bagi pekerja yang di PHK
567.7	Pemberian uang pesangon bagi pekerja yang di PHK
568	Kesejahteraan Pekerja
568.1	Bantuan Kredit/bantuan Modal kerja bagi Naker
568.11	Pemilihan Pekerja Teladan
568.2	Perumahan Pekerja
568.3	Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
568.4	Koperasi Pekerja
568.5	Sarana Transportasi Pekerja
568.6	Perpustakaan Pekerja
568.7	Tempat Ibadah Pekerja
568.8	Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
568.9	Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerjaan
568.91	Lembaga Kerjasama Bipartid
569	Tenaga Kerja Orang Asing
569.1	Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
569.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
569.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
569.4	Perjanjian Kerja Dengan Tenaga Asing
569.5	Data Tenaga Kerja Asing
569.6	Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
569.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing
569.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
569.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
570	PENANAMAN MODAL
571	Penanaman Modal Dalam Negeri
572	Penanaman Modal Asing
573	Modal Patungan (joint venture/penyertaan modal)
574	Pasar Uang dan Modal
575	Saham
576	Koperasi
577	Perizinan Penanaman Modal
578	-
579	-
580	PERBANKAN MONETER
581	Kredit
582	Investasi
583	Tabungan
583.1	Deposito
583.2	Tabanas
583.3	Taska
583.4	Tapelpram
584	Bank Pembangunan Daerah
584.1	Bank Kaltim
584.2	BKK, BPR BKK, Bank Pasar
585	Asuransi
585.1	Dana Kecelakaan Lalu Lintas
585.2	Polis
585.3	Premi
585.4	Tertanggung/ Pemegang Polis
585.5	Uang Pertanggungan



586	<i>Alat Pembayaran meliputi check, giro wesel, transfer</i>
587	<i>Fiscal</i>
588	<i>Hutang Negara Obligasi</i>
589	<i>Moneter</i>
590	<i>AGRARIA</i>
591	<i>Tata Guna Tanah</i>
591.1	<i>Pemetaan dan Pengukuran</i>
591.2	<i>Perpetaan</i>
591.3	<i>Penyediaan Data, Peta dan Publikasi</i>
591.4	<i>Fakta Tata Guna Tanah</i>
591.5	<i>Tanah Kritis</i>
592	<i>Landreform</i>
592.1	<i>Redistribusi</i>
592.11	<i>Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian</i>
592.12	<i>Penentuan Tanah Objek Landreform</i>
592.13	<i>Pembagian Tanah Landreform</i>
592.14	<i>Sengketa Redistribusi Tanah Objek Landreform</i>
592.2	<i>Ganti Rugi</i>
592.21	<i>Ganti Rugi Tanah Kelebihan</i>
592.22	<i>Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan</i>
592.23	<i>Ganti Rugi Tanah Absentee</i>
592.24	<i>Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee</i>
592.25	<i>Ganti Rugi Tanah Partikelir</i>
592.26	<i>Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir</i>
592.3	<i>Bagi Hasil</i>
592.31	<i>Penetapan Imbangan Gadai Tanah</i>
592.32	<i>Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil</i>
592.33	<i>Sengketa Perjanjian Bagi Hasil</i>
592.4	<i>Gadai Tanah</i>
592.41	<i>Pendaftaran Pelaksanaan Gadai tanah</i>
592.42	<i>Pelaksanaan Gadai Tanah</i>
592.43	<i>Sengketa Gadai Tanah</i>
592.5	<i>Bimbingan dan Penyuluhan</i>
592.6	<i>Pengembangan</i>
592.7	<i>Yayasan Dana Landreform (YDL)</i>
593	<i>Pengurusan Hak-Hak Tanah</i>
593.1	<i>Penyusunan Program dan Bimbingan Teknis</i>
593.11	<i>Sewa Tanah</i>
593.12	<i>Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchorus.</i>
593.2	<i>Hak Milik</i>
593.21	<i>Perorangan</i>
593.22	<i>Badan Hukum</i>
593.3	<i>Hak Pakai</i>
593.31	<i>Perorangan</i>
593.311	<i>Warga Negara Indonesia</i>
593.312	<i>Warga Negara Asing</i>
593.32	<i>Badan Hukum</i>
593.321	<i>Badan Hukum Indonesia</i>
593.322	<i>Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing</i>
593.33	<i>Tanah Gedung-Gedung Negeri</i>
593.4	<i>Guna Usaha</i>
593.41	<i>Perkebunan Besar</i>
593.42	<i>Perkebunan Rakyat</i>
593.43	<i>Peternakan</i>
593.44	<i>Perikanan</i>



593.45	<i>Kehutanan</i>
593.5	<i>Hak Guna Bangunan</i>
593.51	<i>Perorangan</i>
593.52	<i>Badan Hukum</i>
593.53	<i>P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)</i>
593.54	<i>Badan Hukum Asing Belanda- PBK No.5 / 56</i>
593.55	<i>Pemulihan Hak (Pen Pres 4 / 1960)</i>
593.6	<i>Hak Pengelolaan</i>
593.61	<i>PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate</i>
593.62	<i>Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan</i>
593.7	<i>Sengketa Tanah</i>
593.71	<i>Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)</i>
593.8	<i>Pencabutan dan Pembebasan Tanah</i>
593.81	<i>Pencabutan Hak</i>
593.82	<i>Pembebasan Tanah</i>
593.83	<i>Ganti Rugi Tanah</i>
594	<i>Pendaftaran Tanah</i>
594.1	<i>Pengukuran/ Pemetaan</i>
594.11	<i>Fotogrametri</i>
594.12	<i>Terristris</i>
594.13	<i>Triangulasi</i>
594.14	<i>Peralatan</i>
594.2	<i>Dana Pengukuran (Permen Agraria No.6/ 1960)</i>
594.3	<i>Sertifikat</i>
594.4	<i>Pejabat Pembuatan Akte Tanah</i>
595	<i>Lahan Transmigrasi</i>
595.1	<i>Tata Guna Tanah</i>
595.2	<i>Landreform</i>
595.3	<i>Pengurusan Hak-hak Tanah</i>
595.4	<i>Pendaftaran Tanah</i>
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	<i>Tata Bangunan, Kontruksi, Industri Kontruksi</i>
602	<i>Pemilihan Rekanan / Pemborong</i>
602.1	<i>Lelang</i>
602.2	<i>Penunjukan</i>
602.3	<i>Prakualifikasi</i>
602.4	<i>Daftar Rekanan Mampu (DRM)</i>
602.5	<i>Tanda Daftar Rekanan (TDR)</i>
603	<i>Arsitektur</i>
603.1	<i>Perencanaan</i>
603.2	<i>Bule print</i>
603.3	<i>Rencana Anggaran Biaya</i>
604	<i>Bahan Bangunan</i>
604.1	<i>Tanah dan Batu</i>
604.2	<i>Aspal</i>
604.3	<i>Besi dan Logam Lainnya</i>
604.31	<i>Besi Beton</i>
604.32	<i>Besi Profil (Konstruksi)</i>
604.33	<i>Paku</i>
604.34	<i>Alumunium Profil</i>
604.4	<i>Bahan Bahan Perlindungan dan Pengawet (Cat, Tech, oil, Pengawet Kayu)</i>
604.5	<i>Semen</i>
604.6	<i>Kayu</i>
604.7	<i>Bahan Penutup Atap</i>
604.8	<i>Alat Alat Penggantung dan Pengunci</i>



604.9	<i>Bahan Bahan Bangunan Lainnya</i>
605	<i>I n s t a l a n s i</i>
605.1	<i>Instalansi Bangunan</i>
605.2	<i>Instalansi Listrik</i>
605.3	<i>Instalansi Air / Sanitasi</i>
605.4	<i>Instalansi Pengatur Udara</i>
605.5	<i>Instalansi Akustik</i>
605.6	<i>Instalansi Cahaya / Penerangan</i>
606	<i>Konstruksi Pencegahan</i>
606.1	<i>Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran</i>
606.2	<i>Terhadap Gempa</i>
606.3	<i>Terhadap Angin / Udara / Panas</i>
606.4	<i>Terhadap Kegaduhan</i>
606.5	<i>Terhadap Gas / Explosive</i>
606.6	<i>Terhadap Serangga</i>
606.7	<i>Terhadap Radiasi Atom</i>
607	-
608	-
610	<i>P E N G A I R A N</i>
611	<i>Irigasi</i>
611.1	<i>Bangunan Waduk</i>
611.11	<i>Bendungan</i>
611.12	<i>Tanggul</i>
611.13	<i>Pelimpahan banjir</i>
611.14	<i>Menara pengambilan</i>
611.15	<i>Pembangunan dermaga</i>
611.2	<i>Bangunan pengambilan</i>
611.21	<i>Bendungan</i>
611.22	<i>Bendungan dengan pintu bilas</i>
611.23	<i>Bendungan dengan pompa</i>
611.24	<i>Pengambilan bebas</i>
611.25	<i>Pengambilan bebas dengan pompa</i>
611.26	<i>Sumur dengan pompa</i>
611.27	<i>Kantung lumpur</i>
611.28	<i>Silf ekstretor</i>
611.29	<i>Escope chenel</i>
611.3	<i>Bangunan pembawa</i>
611.31	<i>Saluran</i>
611.311	<i>Saluran Induk</i>
611.312	<i>Saluran sekunder</i>
611.313	<i>Suplesi</i>
611.314	<i>Tersier</i>
611.315	<i>Saluran kwarter</i>
611.316	<i>Saluran pasangan</i>
611.317	<i>Saluran tertutup/terowongan</i>
611.32	<i>Bangunan</i>
611.321	<i>Bangunan bagi</i>
611.322	<i>Bangunan dan sadap</i>
611.323	<i>Bangunan sadap</i>
611.324	<i>Bangunan check</i>
611.325	<i>Bangunan terjun</i>
611.33	<i>Bax Tersier</i>
611.34	<i>Got miring</i>
611.35	<i>Talang</i>
611.36	<i>Syphon</i>
611.37	<i>Gorong-gorong</i>



611.38	<i>Pelimpahan samping</i>
611.4	<i>Bangunan Pembuangan</i>
611.41	<i>Saluran</i>
611.411	<i>Saluran Pembuangan induk</i>
611.412	<i>Saluran Pembuangan sekunder</i>
611.413	<i>Saluran Pembuangan tersier</i>
611.42	<i>Bangunan</i>
611.421	<i>Bangunan out let</i>
611.422	<i>Bangunan terjun</i>
611.423	<i>Bangunan penahan banjir</i>
611.43	<i>Gorong-gorong pembuangan</i>
611.44	<i>Talang pembuang</i>
611.45	<i>Syphon pembuangan</i>
611.5	<i>Bangunan lainnya</i>
611.51	<i>Jalan</i>
611.511	<i>Jalan Inspeksi</i>
611.512	<i>Jalan Logistik</i>
611.52	<i>Jembatan</i>
611.521	<i>Jembatan Inspeksi</i>
611.522	<i>Jembatan Hewan</i>
611.53	<i>Tangga Cuci</i>
611.54	<i>Kubangan Kerbau</i>
611.55	<i>Waduk Lapangan</i>
611.56	<i>Bangunan Penunjang</i>
611.57	<i>Jaringan Telepon</i>
611.58	<i>Stasiun Argo</i>
611.59	<i>Bangunan TPI dan Pasar Ikan</i>
612	<i>Polder</i>
612.1	<i>Tanggul Keliling</i>
612.11	<i>Tanggul</i>
612.12	<i>Bangunan Penutup Sungai</i>
612.13	<i>Jembatan</i>
612.2	<i>Bangunan Pembawa</i>
612.21	<i>Saluran</i>
612.211	<i>Saluran Muka</i>
612.212	<i>Saluran Pembawa Induk</i>
612.213	<i>Saluran Pembawa Sekunder</i>
612.214	<i>Saluran Stasiun Pompa Pemasukan</i>
612.22	<i>Bangunan Bagi:</i>
612.221	<i>Gorong-Gorong</i>
612.222	<i>Syphon</i>
612.3	<i>Bangunan Pembuangan</i>
612.31	<i>Stasiun Pompa Pembuangan</i>
612.32	<i>Saluran</i>
612.321	<i>Saluran Pembawa Induk</i>
612.322	<i>Saluran Pembawa Sekunder</i>
612.33	<i>Pintu Air Pembuangan</i>
612.34	<i>Gorong-gorong Pembuangan</i>
612.35	<i>Syphon Pembuangan</i>
612.4	<i>Bangunan Lainnya</i>
612.41	<i>Bangunan</i>
612.411	<i>Bangunan Pengukur Air</i>
612.412	<i>Bangunan Pengukur Curah Hujan</i>
612.413	<i>Bangunan Gudang Stasiun Pompa</i>
612.414	<i>Bangunan Listrik Stasiun Pompa</i>
612.42	<i>Rumah Petugas Eksploitasi</i>



613	Pasang Surut
613.1	Bangunan Pembawa
613.11	Saluran Pembawa Induk
613.12	Saluran Pembawa Sekunder
613.13	Saluran Pembawa Tersier
613.14	Saluran Penyimpanan Air
613.15	Saluran Pintu Pembuangan
613.2	Bangunan Pembuangan
613.21	Saluran Pembawa Induk
613.22	Saluran Pembawa Sekunder
613.23	Saluran Pembawa Tersier
613.24	Saluran Penyimpanan Air
613.25	Saluran Pintu Pembuangan
613.3	Bangunan Lainnya
613.31	Kolom Pasang
613.32	Saluran
613.321	Saluran Lalu Lintas
613.322	Saluran Muka
613.33	Bangunan
613.331	Bangunan Penangkis Kotoran
613.332	Bangunan Pengukur Muka Air
613.333	Bangunan Pengukur Curah Hujan
613.34	Jalan
613.35	Jembatan
614	Pengendalian Sungai
614.1	Bangunan Pengaman
614.11	Tanggul Banjir
614.12	Pintu Pengatur Banjir
614.13	Klep Pengatur Banjir
614.14	Tembok Pengaman Talut
614.15	Krib
614.16	Kantung Lumpur
614.17	Check Dam
614.18	Syphon
614.2	Saluran Pengaman
614.21	Saluran Banjir
614.22	Saluran Drainage
614.23	Corepure
614.3	Bangunan Lainnya
614.31	Warning System
614.32	Stasiun
614.321	Stasiun Pengukur Curah Hujan
614.322	Stasiun Pengukur Air
614.323	Stasiun Pengukur Cuaca
614.324	Stasiun Pos Penjagaan
615	Pengaman Pantai
615.1	Tanggul
615.2	Krib
615.3	Bangunan Lainnya
616	Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)
616.1	Stasiun Pompa
616.2	Bangunan Pembawa
616.3	Bangunan Pembuangan
616.4	Bangunan Lainnya
620	JALAN
621	Jalan Kota / Kabupaten



621.1	Daerah Penguasaan
621.11	Tanah
621.12	Tanaman
621.13	Bangunan
621.2	Bangunan Sementara
621.21	Jalan Sementara
621.22	Kantor Proyek
621.23	Gedung Proyek
621.24	Barak Kerja
621.25	Laboratorium Lapangan
621.26	Rumah
621.3	Badan Jalan
621.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
621.32	Stabilisasi
621.4	Perkerasan
621.41	Lapisan Pondasi Bawah
621.42	Lapisan Pondasi
621.43	Lapisan Permukaan
621.5	Drainage
621.51	Parit Tanah
621.52	Gorong -Gorong (Culvert)
621.6	Buku Trotoir
621.61	Tanah
621.62	Perkerasan
621.63	Pasangan
621.7	Medium
621.71	Tanah
621.72	Tanaman
621.73	Perkerasan
621.74	Pasangan
621.8	Daerah Sampingan
621.81	Tanaman
621.82	Pagar
621.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
621.91	Rambu-rambu / Tanda-tanda Lalu Lintas
621.92	Lampu Penerangan
621.93	Lampu Pengaturan Lalu Lintas
621.94	Patok-patok KM
621.95	Patok-patok R.O.W.(Sempadan)
621.96	Rel Pengamanan
621.97	Pagar
621.98	Turap Penahan
621.99	Bronjong
622	Jalan Provinsi
622.1	Daerah Penguasaan
622.11	Tanah
622.12	Tanaman
622.13	Bangunan
622.14	Jalan Sementara
622.15	Jembatan Sementara
622.16	Kantor/ Gedung Proyek
622.17	Barak Kerja
622.18	Laboraturium Lapangan
622.19	Rumah
622.2	Badan Jalan
622.21	Pekerjaan Tanah (Earth Work)



622.22	Stabilisasi
622.3	Perkerasan (Pavement)
622.31	Lapis Pondasi Bawah
622.32	Lapis Pondasi
622.33	Lapis Permukaan
622.4	Drainage
622.41	Parit
622.42	Gorong-gorong (culvert)
622.43	Buku Trotoir
622.44	Tanah
622.45	Perkerasan
622.5	Trotoir
622.51	Tanah
622.52	Perkerasan
622.6	Medium
622.61	Tanah
622.62	Tanaman
622.63	Perkerasan
622.64	Pasangan
622.7	Daerah samping
622.71	Tanaman
622.72	Pagar
622.8	Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan
622.81	Rambu-rambu
622.82	Lampu penerbangan
622.83	Lampu Pengatur lalu lintas
622.84	Patok-patok KM
622.85	Patok-patok R, O, W (Sempadan)
622.86	Rel pengamanan
622.87	Pagar
622.88	Turap penahan
622.89	Bronjong
633	Jalan Nasional
633.1	Daerah penguasaan
633.2	Badan jalan
633.3	Perkerasan (lapis pondasi, lapis permukaan)
633.4	Drainase (gorong-gorong, parit)
633.5	Median
633.6	Daerah samping (pagar, tanaman)
633.7	Bangunan pelengkap dan pengamanan (rambu-rambu)
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada jalan Kota/Kabupaten
631.1	Daerah penguasaan
631.11	Tanah
631.12	Tanaman
631.13	Bangunan
631.2	Bangunan sementara
631.21	Jalan sementara
631.22	Jembatan sementara
631.23	Kantor proyek
631.24	Gedung proyek
631.25	Barak kerja
631.26	Laboratorium lapangan
631.27	Rumah
631.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
631.31	Galian tanah



631.32	Timbunan tanah
631.4	Pondasi
631.41	Pondasi kepala jembatan
631.42	Pondasi Pilar
631.43	Pondasi angker
631.5	Bangunan bawah
631.51	Kepala jembatan
631.52	Pilar
631.53	Piloon
631.54	Landasan
631.6	Bangunan
631.61	Gelagar
631.62	Lantai
631.63	Perkerasan
631.64	Jalan orang/ trotoir
631.65	Sandaran
631.66	Talang air
631.7	Bangunan pengaman
631.71	Turap/ penahan
631.72	Bronjong
631.73	Strek Dam
631.74	Kist Dam
631.75	Coupute
631.76	Krip
631.8	Bangunan pelengkap
631.81	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
631.82	Patok pengamanan
631.83	Patok R, O, W (Sempadan
631.9	Oprit
631.91	Badan
631.92	Perkerasan
631.93	Drainage
631.94	Baku
631.95	Mediun
632	Jembatan pada jalan Provinsi
632.1	Daerah Penguasaan
632.11	Tanah
632.12	Tanaman
632.13	Bangunan
632.2	Bangunan sementara
632.21	Jalan sementara
632.22	Jembatan sementara
632.23	Kantor proyek
632.24	Gedung proyek
632.25	Barak kerja
632.26	Laboratorium lapangan
632.27	Rumah
632.3	Pekerjaan Tanah (earth work)
632.31	Galian tanah
632.32	Timbunan tanah
632.4	Pondasi
632.41	Pondasi kepala jembatan
632.42	Pondasi Pilar
632.43	Pondasi angker
632.5	Bangunan bawah
632.51	Kepala jembatan



632.52	Pilar
632.53	Piloon
632.54	Landasan
632.6	Bangunan
632.61	Gelagar
632.62	Lantai
632.63	Perkerasan
632.64	Jalan orang/trotoir
632.65	Sandaran
632.66	Talang air
632.7	Bangunan pengaman
632.71	Turap/penahan
632.72	Bronjong
632.73	Strek Dam
632.74	Kist Dam
632.75	Coupute
632.76	Krip
632.8	Bangunan pelengkap
632.81	Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas
632.82	Patok pengamanan
632.83	Patok R, O, W (Sempadan)
632.9	Oprit
632.91	Badan
632.92	Perkerasan
632.93	Drainage
632.94	Baku
632.95	Mediun
633	Jembatan pada jalan Nasional
633.1	Daerah Penguasaan (tanah, tanaman, bangunan)
633.2	Bangunan sementara (gudang proyek, kantor proyek)
633.3	Pondasi
633.4	Bangunan bawah
633.5	Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan)
633.6	Bangunan Pengamanan (bronjong strek dam, krib)
633.7	Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu)
640	BANGUNAN
641	Bangunan Pemerintah
641.1	Gedung Pengadilan
641.2	Rumah Pejabat Negara
641.3	Gedung DPR
641.4	Gedung Balai Kota
641.5	Penjara
641.6	Perkantoran
642	Bangunan Pendidikan
642.1	Taman Kanak-kanak
642.2	SD & Sekolah Menengah
642.3	Perguruan Tinggi
643	Bangunan Rekreasi
643.1	Bangunan Olah Raga
643.2	Gedung Kesenian
643.3	Gedung Pemancar
644	Bangunan Perdagangan
644.1	Pusat Perbelanjaan
644.2	Gedung Perdagangan
644.3	B a n k
644.4	Perkantoran



645	Bangunan Pelayanan Umum
645.1	Mandi, Cuci, Kakus (MCK) Umum
645.2	Gedung parkir
645.3	Rumah Sakit
645.4	Gedung telkom
645.5	Terminal Angkutan Umum
645.6	Terminal Angkutan Air
645.7	Terminal Angkutan Darat
645.8	Bangunan Keagamaan
646	Bangunan Peninggalan Sejarah
646.1	Monumen
646.2	Candi
646.3	Kraton
646.4	Rumah Tradisional
647	Bangunan Industri
648	Bangunan Tempat Tinggal
648.1	Rumah Perkantoran
648.11	Inti / Sederhana
648.12	Sedang / Mewah
648.2	Rumah Pedesaan
648.21	Rumah Contoh
648.3	Real estate
649	Elemen bangunan
649.1	Pondasi
649.11	Diatas Tiang
649.2	Dinding
649.21	Penahan beban
649.22	Tidak menahan beban
649.3	A t a p
649.4	Lantai / langit-langit
649.41	Suspendend
649.42	Solit
649.5	Pintu / jendela
649.51	Pintu hermonik
649.52	Pintu biasa
649.53	Pintu sorong
649.54	Jendela kayu
649.55	Jendela sorong
649.56	Jendela vertical
650	TATA KOTA
651	Daerah Perdagangan / Pelabuhan
651.1	Daerah Pusat Perbelanjaan
651.2	Daerah Perkantoran
652	Daerah Pemerintahan
653	Daearah Perumahan (Site dan Servei)
653.1	Kepadatan Rendah (Low Density)
653.2	Kepadatan Tinggi (High Density)
654	Daerah Industri
654.1	Industri Berat
654.2	Industri Ringan
654.3	Industri Rumah (Home Industri)
655	Daerah Rekreasi (Open Spece)
655.1	Publik Garden
655.2	Sport dan Playing Fields
655.3	Open Spece
656	Transportasi (Tata Letak)



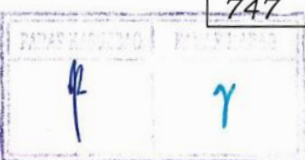
656.1	Jaringan Jalan
656.11	Penerangan Jalan
656.2	Jaringan Kereta Api
656.3	Jaringan Sungai
657	Assineering
657.1	Saluran Pengumpulan
657.2	Instansi Pengolahan
657.21	Bangunan
657.22	Bangunan Penyaring
657.23	Bangunan Penghancur Kotoran
657.24	Bangunan Pengendapan
657.25	Bangunan Pengereng Lumpur
657.26	Unit Disinfektan
657.27	Unit Perpompaan
658	Kesehatan Lingkungan
658.1	Persampahan
658.11	Bangunan Pengumpulan
658.12	Bangunan Pemusnahan
658.2	Pengotoran Udara
658.3	Pengotoran Air
658.31	Air Buangan Industri
658.4	Kegaduhan
658.5	Kebersihan Kota
660	TATA LINGKUNGAN
660.1	Lingkungan Hidup
660.2	Kebersihan Lingkungan
660.3	Pencemaran
660.31	Pencemaran Air
660.32	Pencemaran Udara
660.33	Pencemaran Tanah
660.34	Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3)
661	Kerusakan Lingkungan
661.1	Konservasi Pesisir dan Laut
661.2	Konservasi Sumber Daya Alam
662	Pentaatan Hukum Lingkungan
663	Laboratorium Lingkungan
663.1	Air
663.2	Udara
663.3	Tanah
664	Analisis Dampak Lingkungan
665	Pengembangan Teknologi Lingkungan
666	Pengembangan Kapasitas
667	Pengamanan Lingkungan
670	KETENAGAAN
670.1	Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)
671	Listrik
671.1	Kelistrikan
671.11	Perijinan
671.12	Rekomendasi
671.13	Pembinaan dan Pengawasan
671.11	Kelistrikan PLN
671.12	Kelistrikan non PLN
671.2	Pembangkit Tenaga Listrik
671.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
671.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
671.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas



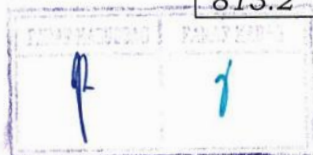
671.24	<i>PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari</i>
671.25	<i>PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir</i>
671.26	<i>PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi</i>
671.27	<i>PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap</i>
671.3	<i>Transmisi tenaga listrik</i>
671.31	<i>Gardu Induk/gardu penghubung/gardu trafo</i>
671.32	<i>Saluran Udara Tenaga Listrik</i>
671.33	<i>Kabel Bawah Tanah</i>
671.4	<i>Distribusi Tenaga Listrik</i>
671.41	<i>Gardu Distribusi</i>
671.42	<i>Tegangan Menengah</i>
671.43	<i>Tegangan Rendah</i>
671.44	<i>Jaringan Bawah Tanah</i>
671.5	<i>Pengusahaan Listrik</i>
671.51	<i>Sambungan Listrik</i>
671.52	<i>Penjualan Tenaga Listrik</i>
671.53	<i>Tarif Listrik</i>
672	<i>Tenaga Air</i>
673	<i>Tenaga Minyak</i>
674	<i>Tenaga Gas</i>
675	<i>Tenaga Matahari</i>
676	<i>Tenaga Nuklir</i>
677	<i>Tenaga Panas Bumi</i>
678	<i>Tenaga Uap</i>
679	<i>Tenaga Lainnya</i>
680	<i>PERALATAN PEKERJAAN UMUM</i>
681	-
690	<i>AIR MINUM</i>
690.1	<i>Hak pengelolaan</i>
690.2	<i>Perusahaan pengelolaan air minum</i>
690.21	<i>BUMD/PDAM</i>
690.22	<i>Swasta</i>
690.23	<i>Perorangan</i>
690.24	<i>Laporan pengelolaan</i>
690.25	<i>Penyertaan modal pemerintah</i>
691	<i>Intako</i>
691.1	<i>Broncapterin</i>
691.2	<i>Sumur</i>
691.3	<i>Bendungan</i>
691.4	<i>Saringan (screen)</i>
691.5	<i>Pintu air</i>
691.6	<i>Saluran pembawa</i>
691.7	<i>Alat ukur</i>
691.8	<i>Perpompaan</i>
692	<i>Transmisi air baku</i>
692.1	<i>Perpipaan</i>
692.2	<i>Katup Udara (Air Rolief)</i>
692.3	<i>Tutup penguras (blow oof)</i>
692.4	<i>Bak pelepas tekanan</i>
692.5	<i>Jembatan pipa</i>
692.6	<i>Syphon</i>
693	<i>Instalasi pengelolaan</i>
693.1	<i>Bangunan Ukur</i>
693.2	<i>Bangunan Aerasi</i>
693.3	<i>Bangunan Pengendapan</i>
693.4	<i>Bangunan Pembubuh bahan kimia</i>



693.5	<i>Bangunan Pengaduk</i>
693.6	<i>Bangunan Saringan</i>
693.7	<i>Perpompaan</i>
693.8	<i>Clear Hell</i>
694	<i>Distribusi</i>
694.1	<i>Reservoir menara bawah tanah</i>
694.11	<i>Menara</i>
694.12	<i>Reservoir menara bawah tanah</i>
694.2	<i>Perpipaan</i>
694.3	<i>Perpompaan</i>
694.4	<i>Jembatan pipa</i>
694.5	<i>Syphon</i>
694.6	<i>Hydran</i>
694.61	<i>Hydran umum</i>
694.62	<i>Hydran kebakaran</i>
694.7	<i>Katup</i>
694.71	<i>Katup Udara (air relief)</i>
694.72	<i>Katup pelepas (blow off)</i>
694.8	<i>Bak pelepas tekanan (pressuer reducing valve)</i>
700	PENGAWASAN
701	<i>Kebijakan dan program pengawasan</i>
702	<i>Pengawasan perencanaan pengadaan/proyek</i>
703	<i>Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana</i>
704	<i>Pengawasan Inventarisasi Asset</i>
705	<i>Pengawasan Perpustakaan/ Kearsipan</i>
706	<i>Pengawasan Penelitian/ Riset</i>
707	<i>Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknoloigi</i>
708	<i>Pengawasan Pertahanan/ BPN</i>
709	-
710	BIDANG PEMERINTAHAN
711	<i>Pengawasan Pemerintah Pusat</i>
712	<i>Pengawasan Pemerintah Provinsi</i>
713	<i>Pengawasan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kotamadya</i>
714	<i>Pengawasan Pemerintah Desa</i>
715	<i>Pengawasan MPR/DPR</i>
716	<i>Pengawasan DPRD Provinsi</i>
617	<i>Pengawasan DPRD Kabupaten/ Kota</i>
618	<i>Pengawasan Bidang Hukum</i>
619	<i>Pengawasa Bidang Hubungan Luar Negeri</i>
720	BIDANG POLITIK
721	<i>Pengawasan Partai termasuk pendanaan partai, atribut partai dll</i>
722	<i>Pengawasan pembinaan ipoleksosbud hankam</i>
723	<i>Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani dan kepemudaan</i>
724	<i>Pengawasan terhadap kepercayaan terhadap Tuhan YME</i>
730	BIDANG KEAMANAN/ KETERTIBAN
731	<i>Pengawasan Kesbangpolinmas</i>
732	<i>Pengawasan pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/ SAR</i>
740	BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741	<i>Pengawasan Pembangunan Desa</i>
742	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan</i>
743	<i>Pengawasan Kebudayaan</i>
744	<i>Pengawasan Kesehatan/ Makanan/ Obat</i>
745	<i>Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)</i>
746	<i>Pengawasan Kesejahteraan Sosial</i>
747	<i>Pengawasan Kependudukan Migrasi/ Urbanisasi</i>



748	<i>Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran</i>
749	<i>Pengawasan Bantuan/ Subsidi Masyarakat</i>
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	<i>Pengawasan Perdagangan dan perindustrian</i>
752	<i>Pengawasan Pertanian dan Perkebunan</i>
753	<i>Pengawasan Kehutanan</i>
754	<i>Pengawasan Pertambangan/ ESDM</i>
755	<i>Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan</i>
756	<i>Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketrasmigrasian</i>
757	<i>Pengawasan PMDN/ PMA</i>
758	<i>Pengawasan Perbankan/ Moneter</i>
759	<i>Pengawasan Kelautan dan Perikanan</i>
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	<i>Pengawasan Pengairan</i>
762	<i>Pengawasan Jalan</i>
763	<i>Pengawasan Jembatan</i>
764	<i>Pengawasan Bangunan</i>
765	<i>Pengawasan Tata Ruang Kota</i>
766	<i>Pengawasan Tata Lingkungan</i>
767	<i>Pengawasan Ketenagaan</i>
768	<i>Pengawasan Air Minum</i>
770	PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
771	<i>Penyimpangan Pejabat Publik</i>
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	<i>Pengawasan Pengadaan PNS</i>
782	<i>Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS</i>
783	<i>Keanggotaan PNS dalam Parpol</i>
784	<i>Penyimpangan pejabat/ PNS</i>
785	<i>Persengketaan PNS</i>
790	BIDANG KEUANGAN
791	<i>Pengawasan Anggaran</i>
792	<i>Pengawasan Akuntansi</i>
793	<i>Pengawasan Perbendaharaan</i>
794	<i>Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah</i>
795	<i>Pengawasan Pendapatan</i>
800	KEPEGAWAIAN <i>Termasuk klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian</i>
800.1	<i>Perencanaan</i>
800.2	<i>Penelitian</i>
800.3	<i>Pengaduan</i>
800.4	<i>Team</i>
800.5	<i>Statistik</i>
800.6	<i>Pendataan</i>
800.7	<i>Peraturan Perundang Undangan</i>
800.8	
810	PENGADAAN <i>Meliputi Lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon pegawai</i>
811	<i>Pendaftaran CPNS</i>
811.1	<i>Testing</i>
811.2	<i>Screening</i>
811.3	<i>Pengumuman tes dan Pemanggilan</i>
812	<i>Pengujian Kesehatan</i>
813	<i>Pengangkatan CPNS</i>
813.1	<i>Pengangkatan CPNS golongan I</i>
813.2	<i>Pengangkatan CPNS golongan II</i>



813.3	<i>Pengangkatan CPNS golongan III</i>
813.4	<i>Pengangkatan CPNS golongan IV</i>
813.5	<i>Pengangkatan Calon Guru Inpre</i>
820	<i>MUTASI</i> <i>Meliputi Pengangkatan, Kenaikan gaji Berkala, Kenaikan Pangkat, Pemindahan, Deta Sering, Tugas belajar dan wajib militer</i>
821	<i>Pengangkatan</i>
821.1	<i>Pengangkatan CPNS Menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)</i>
821.11	<i>Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I</i>
821.12	<i>Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II</i>
821.13	<i>Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III</i>
821.14	<i>Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan IV</i>
821.15	<i>Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Yang Cuti diluar tanggungn negara</i>
821.2	<i>Mutasi</i>
821.21	<i>Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan,</i>
821.22	<i>Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji</i>
821.23	<i>Berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji</i>
821.3	<i>Sekjen/ Dirjen/ Irjen/ Kaban</i>
821.4	<i>Kepala Biro/ Direktur/ Inspektur/ Kepala Pusat/ Sekretaris/ Kepala Dinas/ Asisten Sekwilda</i>
821.5	<i>Kepala Bagian/ Kepala Sub Direktorat/ Kepala Bidang/ Inspektur Pembantu</i>
821.6	<i>Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi/ Kepala Sub Bidang/ Pemeriksa</i>
821.7	<i>Camat</i>
821.8	<i>Lurah Adminstratip (Lurah Desa Lihat 141)</i>
821.9	<i>Jabatan Lainnya</i>
822	<i>Kenaikan Gaji Berkala</i>
822.1	<i>PNS Golongan I</i>
822.2	<i>PNS Golongan II</i>
822.3	<i>PNS Golongan III</i>
822.4	<i>PNS Golongan IV</i>
823	<i>Kenaikan Pangkat</i>
823.1	<i>PNS Golongan I</i>
823.2	<i>PNS Golongan II</i>
823.3	<i>PNS Golongan III</i>
823.4	<i>PNS Golongan IV</i>
824	<i>Pemindahan/ Pelimpahan/ Pembantuan</i>
824.1	<i>PNS Golongan I</i>
824.2	<i>PNS Golongan II</i>
824.3	<i>PNS Golongan III</i>
824.4	<i>PNS Golongan IV</i>
824.5	<i>Fungsional</i>
825	<i>Datasering dan Penempatan Kembali</i>
826	<i>Penunjukan Tugas Belajar</i>
826.1	<i>Proses seleksi</i>
826.2	<i>Tugas Belajar Pasca Sarjana/ Doktoral</i>
826.3	<i>Tugas Belajar Sarjana</i>
826.4	<i>Tugas Belajar non gelar</i>
826.5	<i>Dalam Negeri</i>
826.6	<i>Luar Negeri</i>
826.7	<i>Double degree</i>
826.8	<i>Tunjangan Belajar</i>
826.9	<i>Penempatan Kembali</i>



827	<i>Izin Belajar</i>
827.1	<i>Proses Izin Belajar</i>
827.2	<i>Izin Belajar Pasca Sarjana/ Doktoral</i>
827.3	<i>Izin Belajar Sarjana</i>
827.4	<i>Izin Belajar non gelar</i>
827.5	<i>Dalam Negeri</i>
827.6	<i>Luar Negeri</i>
828	<i>Mutasi Pegawai Instansi Lain</i>
829	-
830	KEDUDUKAN <i>Meliputi Penghitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat, Gaji, Penghargaan Ijazah dan Jenjang Pangkat</i>
831	<i>Perhitungan Masa Kerja</i>
832	<i>Penyesuaian Pangkat/ Gaji</i>
832.1	<i>Pegawai Golongan I</i>
832.2	<i>Pegawai Golongan II</i>
832.3	<i>Pegawai Golongan III</i>
832.4	<i>Pegawai Golongan IV</i>
833	<i>Penghargaan lainnya</i>
834	<i>Jenjang pngka/ eselonering</i>
835	-
840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI <i>Meliputi :Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi/ Distribusi, Perumahan/ Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispensasi</i>
841	<i>Tunjangan</i>
841.1	<i>Jabatan</i>
841.2	<i>Kehormatan</i>
841.3	<i>Kematian</i>
841.4	<i>Tunjangan Hari Raya</i>
841.5	<i>Perjalanan Dinas tetap/ Cuti/ Pindah</i>
841.6	<i>Keluarga</i>
841.7	<i>Sandang, Uang makan, Papan, Pangan (Bapetarum)</i>
841.8	<i>Tunjangan Kinerja</i>
842	<i>Dana</i>
842.1	<i>Taspen</i>
842.2	<i>Askes, Bantuan Kesehatan</i>
842.3	<i>Bantuan Pendidikan</i>
843	<i>Perawatan Kesehatan</i>
843.1	<i>Poliklinik , Klinik Konsultasi</i>
843.2	<i>Perawatan Dokter</i>
843.3	<i>Obat-obatan</i>
843.4	<i>Keluarga Berencana</i>
845	PERUMAHAN/ TANAH
845.1	<i>Perumahan Pegawai</i>
845.2	<i>Tanah kapling</i>
845.3	<i>Insentif Perumahan</i>
846	BANTUAN SOSIAL
846.1	<i>Bantuan Melahirkan</i>
846.2	<i>Bantuan Menikah</i>
846.3	<i>Bantuan Sakit</i>
846.4	<i>Bantuan Advokasi</i>
850	CUTI <i>Meliputi Cuti Tahunanan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti diluar Tanggungan Negara dan Cuti Alasan Lain</i>
851	<i>Cuti Tahunan</i>
852	<i>Cuti Besar</i>



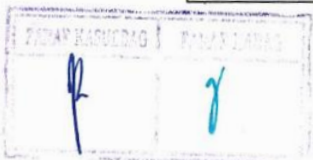
853	Cuti Sakit
854	Cuti Melahirkan
855	Cuti Ibadah Haji
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
857	Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
860	PENILAIAN Meliputi Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi
861	Penghargaan
861.1	Bintang / Satya Lencana
861.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
861.3	Kenaikan Gaji Istimewa
861.4	Hadiah Berupa Uang
861.5	Pegawai teladan
862	Hukuman
862.1	Proses penjatuhan hukuman
862.2	Tegoran lisan
862.3	Tegoran tertulis
862.4	Non Job
862.5	Penundaan Kenaikan gaji
862.6	Penurunan Pangkat
862.7	Pemindahan
862.8	Pemecatan
863	Konduite/penilaian, DP3/ SKP ,disiplin pegawai
864	Ujian Dinas
864.1	Tingkat I
864.2	Tingkat II
864.3	Tingkat III
865	Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri Meliputi : Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi (Lp2p)
866	Rehabilitasi/ Pengaktifan Kembali
867	Penilaian Kinerja
867.1	Struktural
867.2	Fungsional
868	Rehabilitasi
870	TATA USAHA KEPEGAWAIAN
871	Formasi
872	Bezetting / Daftar Urut Kepegawaian
873	Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
873.1	NIP
873.2	KARPEG
873.3	Legitimasi / Tanda Pengenal
873.4	Daftar Keluarga
873.5	KARSU / KARIS
874	Daftar Riwayat Pekerjaan
874.1	Tanggal Lahir
874.2	Penggantian Nama
874.3	Izin Kepartaian / Organisasi
875	Daftar Riwayat Pekerjaan
875.1	Kewenangan Mutasi Kepegawaian
875.2	Pelimpahan Wewenangan
875.3	Spesimen Tanda Tangan
876	Penggajian
877	Sumpah/ Janji
878	Korps Kepegawaian



880	PEMBERHENTIAN PEGAWAI Meliputi : Formasi besetting registrasi, Daftar riwayat hidup, Hak penggajian, Sumpah/janji dan Korps Pegawai
881	Atas Permintaan Sendiri / Pengunduran Diri
882	Dengan Hak Pensiun
882.1	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.I
882.2	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.II
882.3	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.III
882.4	Pemberhentian Dengan Hak Pensiun PNS Gol.IV
882.5	Pensiun Janda / Duda
882.6	Pensiun Yatim Piatu
882.7	Uang Muka Pensiun
883	Karena Meninggal (dalam Tugas)
884	Alasan Lain, Diantaranya Keuzuran Jasmani
885	Uang Pesangon
886	Uang Tunggu
887	Untuk Sementara
888	Tidak Dengan Hormat
890	PENDIDIKAN PEGAWAI Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non Reguler, Pendidikan Keluar Negeri, Methode, Tenaga pengajar, Administrasi pendidikan, Fasilitas dan Sarana Pendidikan
890.1	Perencanaan Program, kurikulum, silabi, proposal dan Pelaporan Diklat
891	Pendidikan Prajabatan
892	Pendidikan Dalam Jabatan
892.1	Diklatpim
892.2	Diklat Teknis
892.3	Diklat Fungsional
893	Kursus-kursus ,Penataran , Bimbingan Teknis
894	Pengembangan Pegawai
894.1	Tugas Belajar
894.2	Ijin Belajar
894.3	Tunjangan Belajar
894.4	Bantuan Pendidikan
894.5	Penempatan Kembali
895	Metode
895.1	Kuliah
895.2	Ceramah , Symposium
895.3	Diskusi
895.4	Kuliah Lapangan / OL, Widya Wisata, KKN
895.5	Kurikulum
895.6	Karya Tulis
895.7	Penugasan
895.8	Permainan Peran
895.9	Gladi
896	TENAGA PENGAJAR
896.1	Usul Menjadi Tenaga Pengajar
896.2	Permintaan Tenaga Pengajar
896.3	Penambah Tenaga Pengajar
897	ADMISTRASI PENDIDIKAN
897.1	Tahun Pelajaran
897.2	Persyaratan, Pendaftar, testing Ujian
897.3	STTP
897.4	Penilaian Angka Kredit
897.5	Laporan Pendidikan dan pelatihan



898	FASILITAS BELAJAR
898.1	Tunjangan Belajar
898.2	Asrama
898.3	Uang Makan
898.4	Uang Transport
898.5	Uang Buku
898.6	Uang Ujian
898.7	Uang Semester/uang Kuliah
898.8	Uang saku
899	SARANA
899.1	Persediaan Buku
899.2	Bantuan Alat-Alat Tulis
899.3	Bantuan sarana Belajar lainnya
899.4	Perabot Kantor
899.5	Alat Angkutan
899.6	Pakaian Dinas
899.7	Inventaris
900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	Dana Alokasi Umum
905	Dana Alokasi Khusus
910	ANGGARAN
910.1	Keputusan tentang penunjukan pengelola keuangan SKPD / PPKD
910.2	Keputusan Gubernur tentang penunjukan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD
911	Rutin
912	Pembangunan
913	Anggaran Belanja Tambahan
913.1	Daftar Isian Kegiatan
914	Daftar Isian Kegiatan (Dik)
914.1	Daftar Usulan Kegiatan (Duk)
915	Daftar Isian Proyek (Dip)
915.1	Daftar Usulan Proyek (Dup)
915.2	Daftar Isian Pengguna Anggaran (Dipa/Dpa)
916	Revisi Anggaran
917	DPA / DPPA / DPAL-SKPD / PPKD
918	Anggaran Kas
919	Surat Penyediaan Dana (SPD)
920	OTORITAS
921	Laporan -laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
922	Rutin
923	Pembangunan
924	Siap
925	Ralat Sko
926	-
927	-
930	VERIFIKASI
931	Spm Rutin (Daftar P8)
932	Spm Pembangunan (Daftar P8)
933	Penerimaan (Daftar P6.7)
934	Spj Rutin
935	Spj Pembangunan
936	Nota Pemeriksaan
937	Sp Pindahan Pembukuan



938	-
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran
942	Permintaan Data Anggaran
943	Laporan Fisik Pembangunan
944	Penata Usaha Keuangan
945	Penyusunan Perhitungan Anggaran
946	Permintaan Data Anggaran
947	Laporan Fisik Pembangunan
948	-
949	-
950	PERBENDAHARAAN
951	Tuntutan Ganti Rugi (Icw Pasal 74)
952	Tuntutan Bendaharawan
953	Penghapusan Kekayaan Negara
954	Pengangkatan/ Penggantian Pemimpin Proyek Dan Pengangkatan/ Pemberhentian Bendaharawan
955	Specimen Tanda Tangan
956	Surat Tagihan Piutang, Ikhtisar Bulanan
957	Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
958	Surat Penolakan Penerbitan SP2D
959	Daftar Penguji SP2D
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961	Bimtek – bimtek / kursus yang berkaitan dengan keuangan
962	Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
963	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
964	Laporan Keuangan Bendaharawan
965	Evaluasi Dan Pengendalian
966	Tuntutan
966.1	Tuntutan Ganti Rugi
966.2	Tuntutan Perbandaharaan
967	Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten / Kota
968	Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten / Kota
969	Edaran-edaran
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
971.1	Bagi Hasil Pajak
971.11	Pajak Bumi Bangunan (PBB)
971.12	Bela Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB)
971.13	Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Pasal 21)
971.2	Bagi Hasil Bukan Pajak
971.21	Sumber Daya Alam / Migas
972	Subsidi
973	Pajak
973.1	Pajak Kendaraan Bermotor
973.2	Pajak Kendaraan Diatas Air
973.3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
973.4	Pajak Pengendalian & Pemanfaatan Air Permukaan
973.5	Pajak Reklame
974	Retribusi
974.1	Retribusi Bidang Kesehatan
974.2	Retribusi Bidang Seni Budaya dan Pariwisata
974.3	Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan (termasuk pasar)
974.4	Retribusi Bidang Pertanian dan Perternakan (termasuk pemotongan hewan)



974.5	<i>Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi (termasuk trayek, kelebihan muatan, telekomunikasi,</i>
974.6	<i>Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dll)</i>
974.7	<i>Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan</i>
974.8	<i>Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan Air permukaan dan metrologi</i>
974.9	<i>Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah)</i>
975	<i>Bea</i>
975.1	<i>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</i>
975.2	<i>Bea Balik Nama Kendaraan Diatas Air</i>
976	<i>Cukai</i>
977	<i>Pungutan</i>
978	<i>Bantuan</i>
978.1	<i>Bantuan Presiden</i>
978.2	<i>Bantuan Menteri</i>
978.3	<i>Bantuan Gubernur</i>
978.4	<i>Bantuan Bupati</i>
978.5	<i>Bantuan Lainnya</i>
979	<i>Pendapatan Lainnya</i>
979.1	<i>Hasil penjualan asset Daerah Yang Tidak Dipisahkan</i>
979.11	<i>Pelepasan Hak Atas Tanah</i>
979.12	<i>Penjualan Rumah Jabatan / Rumah Dinas</i>
979.13	<i>Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2</i>
979.14	<i>Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4</i>
979.15	<i>Penjualan Bongkaran Bangunan Dan Inventaris</i>
979.16	<i>Penjualan Drum Bekas</i>
979.17	<i>Penjualan Hasil Penebangan Pohon</i>
979.2	<i>Penerimaan Jasa Giro</i>
979.21	<i>Jasa Giro Kas Daerah</i>
979.22	<i>Jasa Giro Pemegang Kas</i>
979.23	<i>Jasa Giro Khusus</i>
979.3	<i>Penerimaan Bunga Bank</i>
979.31	<i>Bunga Deposito</i>
979.32	<i>Bunga Tabungan</i>
979.4	<i>Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian Atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)</i>
979.41	<i>Sumbangan Pihak Ke Tiga</i>
979.42	<i>Sumbangan Pihak Ke Tiga Kendaraan (Daeler)</i>
979.43	<i>Sumbangan Pihak Ke Tiga Kayu</i>
979.5	<i>Penerimaan Lain-lain</i>
979.51	<i>Penerimaan Kembali Kredit Bank BKK</i>
979.52	<i>Ternak Tidak Layak Bibit</i>
979.53	<i>Sewa Internet</i>
979.54	<i>Penerimaan Dari Dana Bergulir / Revolving</i>
979.55	<i>Kerjasama Dengan BUMIDA</i>
979.56	<i>Penerimaan Duks</i>
979.57	<i>Tempat Rekreasi Nusakambangan</i>
979.58	<i>Seteron TP-TGR</i>
979.59	<i>Penerimaan Lainnya dari Setda / SKPD</i>
979.6	<i>Dekonsentrasi</i>
979.7	<i>Hibah</i>
979.71	<i>Hibah Pemerintah</i>
979.72	<i>Hibah Luar Negeri</i>
979.73	<i>Hibah Swasta / Perorangan</i>
979.8	<i>Bantuan Luar Negeri</i>



979.9	Utang Negara / Daerah
980	PENGELOLAAN KAS DAERAH
981	Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji
982	Laporan rekapitulasi penerimaan daerah
983	Daftar pemotongan dan penyetoran pajak (PPN / PPh) dari CV/PT Instansi
984	Surat tanda setoran (STS)
985	Laporan Realisasi Daerah
985.1	Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
985.2	Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
986	Rekonsiliasi
986.1	Surat Rekonsiliasi Penerimaan
986.2	Laporan Rekonsiliasi Bank
987	Laporan Mutasi Penempatan Deposito
988	Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)
989	-
990	BENDAHARAWAN
991	SKPP
992	Teguran SPJ
993	Laporan SPJ
994	
995	

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH
 KABUPATEN BALANGAN**



**H. M. IWAN SETIADY, SH
 NIP. 19780929 200501 1 009**

BUPATI BALANGAN,

ttd
 H. ANSHARUDDIN

